



KONSTRUKSI INDONESIA

Media Informasi & Komunikasi Direktorat Jenderal Bina Konstruksi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat | Edisi 5 Tahun 2016



PEKERJA KONSTRUKSI MENGHADAPI MEA



BERITA UTAMA

3

KEMENTERIAN PUPR
Menerima Kunjungan Asosiasi Kontraktor Tanzania

BERITA TERKINI

18

SOCIAL MARKETING
Optimalisasi Produk Dirjen Bina Konstruksi

LAPORAN KHUSUS

20

KEMENTERIAN PUPR SERTIFIKASI
1800 Tenaga Kerja Konstruksi Secara Serempak

Ditjen Bina Konstruksi.... Bersama Kita membangun! Tagline yang sering diucapkan Direktur Jenderal Bina Konstruksi untuk meningkatkan semangat bekerja guna membangun infrastruktur Ibu Pertiwi dari Sabang hingga Marauke. Memasuki usia dua tahun sebagai salah satu unit eselon 1 Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan, DJBK tidak pernah lelah untuk bekerja menyiapkan pembinaan konstruksi yang handal.

Meski baru, Direktorat Jenderal Bina Konstruksi saat ini tengah berlari untuk meningkatkan pembangunan infrastruktur Indonesia dengan melakukan Kerja Nyata, seperti meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) Konstruksi, yang berperan sebagai ujung tombak penyelenggaraan konstruksi di lapangan.

Seperti, melakukan uji sertifikasi sebanyak 105 pekerja konstruksi di Tasikmalaya untuk meningkatkan kemampuan tukang dan mandor lokal agar lebih berkompeten dan memiliki sertifikat yang berguna untuk meningkatkan pendapatan, sekaligus mampu digunakan dalam persaingan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) yang sudah dimulai sejak awal 2016 lalu.

Membicarakan MEA, dalam edisi 5 kali ini, Kami (Tim Redaksi) akan menyuguhkan pembahasan tentang Pekerja Konstruksi Menghadapi MEA yang sudah berlangsung selama 10 bulan terakhir. Tidak hanya meningkatkan pembinaan tenaga kerja konstruksi, Direktorat Jenderal Bina Konstruksi juga turut menyiapkan bahan material dan peralatan konstruksi. Untuk mempermudah masyarakat konstruksi dalam mengetahui informasi tentang ketersediaan bahan material dan peralatan konstruksi terutama produk baja di Indonesia, baru-baru ini Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat melalui Direktorat Jenderal Bina Konstruksi meluncurkan Katalog Produk Baja Konstruksi 2015.

Direktorat Jenderal Bina Konstruksi tidak hanya berperan dalam peningkatan tenaga kerja konstruksi di Indonesia, melainkan juga bertugas untuk meningkatkan penyelenggaraan, bidang kelembagaan, kerjasama dan pemberdayaan, serta Investasi Infrastruktur. Belum lama ini, Direktorat Jenderal Bina Konstruksi turut berpartisipasi dalam perundingan bilateral antara Indonesia dan 4 negara Eropa seperti Swiss, Norwegia, Islandia, dan Liechtenstein yang tergabung dalam European Free Trade Association (EFTA).

Dengan ketersediaan tenaga kerja konstruksi yang berkompetensi, handal, dan memiliki sertifikat dalam era MEA saat ini. Indonesia dapat mengembangkan kemampuannya menyelenggarakan proyek konstruksi di luar negeri seperti Tanzania. Kenapa Tanzania? karena beberapa waktu lalu, Asosiasi Kontraktor Tanzania mengunjungi Indonesia yang bertujuan mengumpulkan pengetahuan dan menawarkan peluang kepada Indonesia untuk turut terlibat dalam pembangunan di sektor Infrastruktur Tanzania.

Hal tersebut, dapat dimanfaatkan sebagai lampu hijau, untuk mengembangkan kemampuan kontraktor Indonesia di luar negeri serta mengeksport ketersediaan material dan peralatan konstruksi Indonesia ke luar negeri. Tak hanya itu saja, Tim Redaksi juga menyuguhkan bacaan menarik lainnya seperti artikel terkait Lean Construction, Social Marketing ; Optimalisasi Produk Ditjen Bina Konstruksi, dan tertib penyelenggaraan konstruksi bidang pengadaan barang dan jasa di lingkungan Kementerian PUPR.

Dengan semangat Bersama Kita Membangun... Direktorat Jenderal Bina Konstruksi optimis mampu memberikan peranan dalam upaya meningkatkan pembangunan infrastruktur dalam negeri sesuai dengan tugas dan fungsinya. Demi kesejahteraan Masyarakat Indonesia di masa mendatang. Selamat membaca!



Pembina/Pelindung:
Direktur Jenderal Bina Konstruksi

Dewan Redaksi:
Sekretaris Ditjen Bina Konstruksi;
Direktur Bina Investasi Infrastruktur;
Direktur Bina Penyelenggaraan Jasa Konstruksi;
Direktur Bina Kelembagaan dan Sumber Daya Jasa Konstruksi;
Direktur Bina Kompetensi dan Produktivitas Konstruksi;
Direktur Kerjasama dan Pemberdayaan.

Pemimpin Umum:
Hambali

Pemimpin Redaksi:
Kristinawati Pratiwi Hadi

Penyunting / Editor:
Dendy Rahadian
Kunthi Adinegoro
Indri Eka Lestari

Redaksi Sekretariat:
Anik Dwi Wahyuningsih
Agus Raharyo,
Budiarto Kusumawardono,
Vita Puspitasari,
Dicky Rinaldi

Administrasi dan Distribusi:
M. Aldenny
Merti Kristina Bastari
Agus Firngadi

Desain dan Tata Letak:
Dagu Komunika

Fotografer:
Sri Bagus Herutomo

Alamat Redaksi:
Gedung Utama Lt. 10
Jl. Pattimura No.20, Kebayoran Baru
Jakarta Selatan
Tlp/Fax : 021-72797847
E-Mail :
hukumdatakompu.djbk@gmail.com

edisi ini

BERITA UTAMA

- 3 Kementerian PUPR Menerima Kunjungan Asosiasi Kontraktor Tanzania
- 6 The 11th Round of Negotiation of Indonesia Efta Comprehensive Economic Partnership Agreement (Ie Cepa)
- 9 Uji Kelayakan Dan Kepatutan Barometer Dalam Mencari Pengurus Lembaga Periode 2016-2020 Yang Kompeten Dan Berintegritas

BERITA TERKINI

- 12 Katalog Produk Baja Konstruksi Sebagai Bahan Referensi Penggunaan Produk Baja Konstruksi yang Memenuhi Standar Nasional Indonesia (SNI)

- 16 Konstruksi Ramping (Lean Construction), Menuju Konstruksi Indonesia yang Berdaya Saing
- 17 Tertib Penyelenggaraan Konstruksi Ditentukan dari Tertibnya Pokja ULP Bidang Pengadaan Barang dan Jasa di Lingkungan Kementerian PUPR
- 18 Social Marketing: Optimalisasi Produk Dirjen Bina Konstruksi

LAPORAN KHUSUS

- 20 Kementerian PUPR Sertifikasi 1800 Tenaga Kerja Konstruksi Secara Serempak

LIPUTAN KHUSUS

- 24 Pekerja Konstruksi Menghadapi MEA
- 26 Model Pembiayaan dan Investasi Kpbu Perumahan Rakyat
- 28 105 Pekerja Konstruksi di Tasikmalaya Ikuti Uji Sertifikasi



KEMENTERIAN PUPR

Menerima Kunjungan Asosiasi Kontraktor Tanzania

Kantor Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), senin (17/10) sejak pagi terlihat sibuk, karena hari itu Kementerian PUPR tengah bersiap menyambut tamu dari salah satu negara di benua Hitam nan eksotis, Tanzania.

 Indri Eka Lestari

Sebanyak 21 orang yang tergabung dalam Association of Citizen Contractors Tanzania (ACCT) atau Asosiasi Kontraktor Tanzania mengunjungi Kantor Kementerian PUPR guna melakukan site visit dan studi banding di bidang konstruksi.

Mewakili Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Sekretaris Jenderal Kementerian PUPR Anita Firmanti


menyambut rombongan bersama dengan Direktur Jenderal Bina Konstruksi, Yusid Toyib. Dalam sambutannya Anita Firmanti menyatakan bahwa pertemuan ini baik untuk Indonesia dalam mengembangkan ekspor pasar konstruksi ke wilayah afrika, termasuk potensi peluang ekspor material dan peralatan serta ekspor jasa konstruksi ke Afrika khususnya Tanzania.

"Kementerian PUPR menyambut baik kunjungan ini dan diharapkan Indonesia dapat mengambil manfaat maksimal melalui

kerjasama dengan Negara lain seperti Tanzania", ujar Anita Firmanti.

Rombongan yang dipimpin oleh Duta Besar Indonesia untuk Tanzania Zakaria Anshar dalam sambutannya mengatakan bahwa saat ini Tanzania sedang fokus mengembangkan diri di bidang konstruksi, banyak proyek konstruksi yang tengah dikerjakan mulai dari bandara, pelabuhan, jalan layang, rel kereta dan perumahan.

Tujuan mereka berkunjung adalah mengumpulkan pengetahuan dan menawarkan peluang kepada Indonesia untuk turut terlibat dalam pembangunan, terutama di sektor infrastruktur. Para delegasi dari Tanzania ini, merupakan Asosiasi Kontraktor Tanzania yang terdiri atas kontraktor bangunan dan sipil serta kontraktor bidang listrik, mekanik, dan pendingin udara.


Tujuan mereka berkunjung adalah mengumpulkan pengetahuan dan menawarkan peluang kepada Indonesia untuk turut terlibat dalam pembangunan, terutama di sektor infrastruktur.





Tanzania memiliki area potensial untuk mengembangkan dan mengeksplorasi lebih jauh oleh Indonesia. Pasalnya, Tanzania baru saja melakukan pemindahan pusat pemerintahan dari Dar es Salaam ke Ibu Kota Dodoma. Hal tersebut secara signifikan dapat meningkatkan jumlah proyek pembangunan.

Berdasarkan laporan tahun 2015, kebutuhan perumahan di Tanzania diprediksi mencapai 200.000 unit per tahun. Sehingga selama beberapa tahun terakhir, Tanzania tengah melakukan pengembangan infrastruktur. Serupa dengan yang dilakukan Indonesia saat ini, namun Indonesia memiliki pengalaman dalam sektor infrastruktur yang dapat dibagikan ke Tanzania serta memiliki kapasitas material konstruksi yang tinggi dibandingkan Tanzania.

Sementara itu Dirjen Bina Konstruksi Yusid Toyib pada kesempatan ini memberikan paparan mengenai proses pembinaan konstruksi di Indonesia serta tujuan pembinaan yang dituju. Selain itu, Dirjen Bina Konstruksi pun memberikan gambaran tentang changing paradigm infrastructure investment di Indonesia.

"Studi banding seperti ini diharapkan juga dapat membuka mata negara lain untuk dapat melihat bahwa Indonesia membuka kesempatan para investor infrastruktur bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat yang tertarik untuk menanamkan modal dan bekerjasama dalam bentuk public private partnership (PPP)", kata Yusid.

Selain itu diharapkan Indonesia pun



dapat memberikan referensi kepada negara-negara lain, khususnya Tanzania dalam hal investasi infrastruktur, penyelenggaraan konstruksi, aspek kelembagaan, standar kompetensi, serta kerjasama dan pemberdayaan jasa konstruksi.

Untuk kondisi sektor Jasa konstruksi sendiri saat ini Indonesia belum melakukan ekspor ke Tanzania. Ke depan dengan melihat situasi ekonomi yang baik di Tanzania, sangat mungkin Indonesia mengeksport jasa konstruksi ke kawasan Benua Afrika tersebut khususnya Tanzania di masa yang akan datang.

Selain itu, Indonesia pun dapat mengeksport sumber daya material bersNI (Standar Nasional Indonesia) dan tenaga kerja konstruksi Indonesia untuk mengerjakan pekerjaan konstruksi di Tanzania. Beberapa peluang ekspor yang dapat dimanfaatkan oleh dunia usaha Indonesia untuk memasok kebutuhan pasar di Tanzania antara lain, Gen-Set, rangka baja, kawat baja, kabel listrik, kaca/jendela untuk kantor/rumah, ubin keramik, marmer, rangka pintu, pintu jadi, lampu rumah, lampu jalan, serta spare-parts alat-alat berat.

Kunjungan yang berlangsung selama 5 hari di Indonesia, dimanfaatkan betul para Kontraktor Tanzania untuk melihat langsung ketersediaan sektor konstruksi di Indonesia. Setelah bertemu dengan Sekretaris Jenderal Kementerian PUPR dan Dirjen Bina Konstruksi rombongan selanjutnya, melakukan studi banding pengalaman di bidang konstruksi ke Balai Material dan Peralatan, Direktorat Jenderal Bina Konstruksi Kementerian

PUPR. Serta ke Produsen Material dan Peralatan Konstruksi, serta melakukan pertemuan dengan Asosiasi Kontraktor Indonesia (AKI) untuk dapat membangun hubungan kerja antar Asosiasi bidang Konstruksi

Sesampainya di Balai, rombongan langsung di suguuhkan dengan Mobile Training Unit (MTU) yang menjadi tools Ditjen Bina Konstruksi dalam meningkatkan tenaga kerja konstruksi yang berkompeten dan handal, bahkan mampu menjangkau hingga ke pelosok-pelosok negeri. Saat ini, Direktorat Jenderal Bina Konstruksi melalui Balai Material dan Peralatan Konstruksi telah menyeraherimakan 16 MTU kepada pemerintah Provinsi/Kota untuk membantu meningkatkan tenaga kerja konstruksi lokal/daerah.



Kepala Balai Material dan Peralatan Konstruksi Tolhas Z Sidabutar menyambut rombongan dengan mengajak keliling dan melihat langsung material dan peralatan yang dimiliki oleh Ditjen Bina Konstruksi. "Kami melakukan pelatihan dan uji kompetensi langsung di Balai menggunakan peralatan dan material yang tersedia di sini" Jelas Tolhas kepada rombongan.

Seperti diketahui, Balai yang terletak di Jl. dr. Suratmo No 1, Gunung Sahari Jakarta ini sudah mencetak 33 orang instruktur konstruksi yang tersebar di 33 provinsi di Indonesia, melalui program pelatihan yang dilakukan selama 5 minggu, dilanjutkan dengan melakukan uji kompetensi hingga mendapatkan sertifikat. "Tidak hanya memberikan pelatihan kepada calon instruktur konstruksi, di Balai ini juga mencetak tenaga ahli alat berat seperti ekskavator, dozer dan loader", tutup Tolhas.

Rombongan ACCT bersama Direktorat Jenderal Bina Konstruksi, Kementerian PUPR melanjutkan kunjungan ke pabrik precast PT. Wijaya Karya beton di Karawang Jawa Barat yang saat ini tengah mengerjakan proyek pembangunan MRT Jakarta dan proyek simpang semanggi di Jakarta. Dilanjutkan mengunjungi PT. Olah Bumi Mandiri yang



merupakan salah satu pabrik aspal Indonesia yang telah mengerjakan berbagai proyek pekerjaan jalan di Indonesia seperti proyek jalan tol dalam kota Jakarta.

Di pabrik aspal tersebut, salah satu kontraktor mengaku senang karena Indonesia memiliki ketersediaan bahan material seperti aspal dengan kualitas yang cukup baik. Seperti aspal buton dari pulau buton Sulawesi tenggara, pasalnya di Tanzania ketersediaan bahan material seperti aspal di Tanzania masih kurang baik.

Ketua Komisi Nasional Hubungan Antar Lembaga Non-pemerintah Asosiasi Kotraktor Indonesia (AKI) Destiawan

menyambut positif Kementerian PUPR mewakili pemerintah dapat memfasilitasi kunjungan seperti ini. Diharapkan dengan dukungan dari pemerintah seperti ini dapat membuka jalan bagi pihak swasta untuk mengembangkan kemampuan kontraktor Indonesia di luar negeri.

Seperti diketahui bersama, saat ini kontraktor Indonesia seperti PT Utama Karya (persero) Tbk, PT Waskita Karya (persero) Tbk, PT Wijaya Karya (persero) Tbk, PT Adhi Karya (persero) Tbk, dan PT PP (persero) Tbk, sudah merambah proyek di luar negeri seperti Malaysia, Brunei Darussalam, Timor Leste, India, Qatar, Arab, Libya, dan Aljazair. **





The 11th Round of Negotiation of Indonesia EFTA COMPREHENSIVE ECONOMIC PARTNERSHIP AGREEMENT (IE CEPA)

✍ Denik Haryani, ST, M.Sc, Hasfarm Dian Purba, ST, dan Femmy Aprilia, S.IP

Perundingan bilateral antara Indonesia dan 4 negara Eropa yang tergabung dalam European Free Trade Association (EFTA) yang terdiri dari negara Swiss, Norwegia, Islandia, dan Liechtenstein telah memasuki putaran perundingan yang ke-11 pada 27-30 September 2016 yang lalu di Kota Bandung. Indonesia-EFTA Comprehensive Economic Partnership Agreement atau disingkat IE-CEPA merupakan perundingan bilateral antara kedua negara yang telah dimulai secara resmi pada tahun 2007 silam yang bertujuan untuk memperkuat hubungan ekonomi antara Indonesia dan negara EFTA melalui peningkatan dan diversifikasi perdagangan barang dan jasa serta investasi. Adanya peningkatan perdagangan dan investasi niscaya akan membuka kesempatan baru bagi dunia usaha, tenaga kerja, serta konsumen kedua negara untuk terus berkembang yang akan

berdampak pada peningkatan kesejahteraan di Indonesia dan negara-negara EFTA.

Perundingan IE CEPA sempat terhenti selama 2 tahun dan kembali direaktivasi pada awal tahun ini melalui perundingan



Agenda pertama yang dibahas dalam pertemuan ini adalah pembahasan draft Teks Perjanjian IE CEPA Bab Trade in Services



ke-10 yang dilaksanakan pada 23-27 Mei 2016 di Interlaken, Swiss. IE CEPA melingkupi 11 area pokok perundingan yaitu Trade in Goods, Rules of Origin (ROO), Trade Facilitation, Trade Remedies, Sanitary and Phytosanitary Measures, Trade in Services,

Investment, Intellectual Property Rights, Cooperation and Capacity Building, Trade and Sustainable Development, dan Legal, Horizontal, and Institutional Provisions.

Dasar komitmen yang ditawarkan oleh Indonesia dalam kelompok perundingan perdagangan jasa (Working Group Trade

in Services) fora IE CEPA adalah perjanjian General Agreement on Trade in Services (GATS) Putaran Uruguay, termasuk dalam hal ini untuk sektor konstruksi. Peningkatan komitmen Indonesia secara umum terjadi pada peningkatan level liberalisasi dari 49% menjadi 51%; termasuk dalam hal ini Kementerian PUPR sebagai pembina sektor konstruksi telah memperbolehkan

kepemilikan modal asing untuk membentuk joint venture sebesar maksimal 51% untuk sektor/subsektor Construction and Related Engineering Services namun untuk sektor/subsektor Business Services, tetap pada angka 49% (sesuai Horizontal Commitments).

Perundingan IE CEPA Putaran ke-11

Negosiasi putaran ke-11 perundingan IE CEPA yang diselenggarakan di Hotel Papandayan Bandung pada 27 s.d 30 September 2016 dihadiri oleh 152 Delegasi dari Indonesia dan 47 Delegasi dari negara-negara yang tergabung dalam EFTA. Duta Besar Soemadi Brotodiningrat dalam kesempatan tersebut bertindak sebagai ketua perunding IE CEPA dari Indonesia dan Duta Besar Markus Schlagenhof bertindak sebagai ketua perunding dari EFTA.

mengingat terdapatnya ketidaksepahaman terkait beberapa isu diantara kedua belah pihak. Pertemuan ini dihadiri oleh kelompok perunding perdagangan jasa atau Working Group on Trade in Services, dimana delegasi Indonesia dipimpin oleh Herliza, Direktur Perundingan Perdagangan Jasa, Kementerian Perdagangan RI dan delegasi EFTA dipimpin oleh Christian Pauletto, Head for Policy and Trade in Services, State Secretariat for Economic Affairs (SECO).

Agenda pertama yang dibahas dalam pertemuan ini adalah pembahasan draft Teks Perjanjian IE CEPA Bab Trade in Services, terutama pada pasal-pasal yang masih menjadi pending issue pada Pertemuan IE CEPA sebelumnya. Salah satu pasal yang menjadi isu utama adalah pasal Recognition. Indonesia mengusulkan

pasal ini dioperasionalkan dengan mengembangkan mekanisme pembentukan Mutual Recognition Arrangement (MRA) sebagaimana yang diberlakukan dalam Perjanjian Liberalisasi Perdagangan Jasa ASEAN (AFAS). Namun EFTA menolak usulan ini dengan alasan bahwa hal tersebut bukan merupakan common practice bagi negara anggota EFTA.

Perundingan kemudian dilanjutkan dengan pembahasan Annex on Financial Services, Maritime Transport Services, Movement of Natural Person (MNP), Energy Related Services, dan Telecommunication Services. Dari 5 Annex yang dibahas, hanya 1 Annex yang telah mencapai kata sepakat, yaitu Financial Services.

Beranjak pada agenda selanjutnya, pembahasan akses pasar kali ini dilakukan secara bilateral. Indonesia dan Norwegia saling bertukar Offer dan mencatat sektor-sektor yang menjadi fokus utama bagi kedua belah pihak. Berbeda dengan Islandia yang menyampaikan akan memberikan request secara tertulis dalam waktu 2 (dua) minggu setelah pertemuan ini.

Sementara itu, Swiss meminta agar Indonesia dapat menambahkan kategori Installers dan Maintainers pada Mode 4. Installers dan Maintainers yang dimaksud oleh Swiss adalah penyediaan jasa untuk pemasangan mesin berteknologi tinggi. Menanggapi hal ini, pimpinan delegasi Indonesia dengan didampingi oleh Kementerian Perindustrian, Kementerian PUPR, dan Kementerian Ketenagakerjaan menolak usulan Swiss tersebut. Lebih lanjut, Swiss dan Liechtenstein menyatakan agar pembahasan tersebut dilanjutkan dalam putaran perundingan perdagangan jasa selanjutnya yang direncanakan akan dilaksanakan pada bulan Februari 2017 di Jenewa, Swiss.

b. Progres Kelompok Perundingan Cooperation and Capacity Building (CCB)

Cooperation and Capacity Building merupakan konteks baru yang diangkat dalam perundingan internasional seperti IE CEPA. Dalam perundingan IE CEPA, Cooperation and Capacity Building disusun dalam sebuah chapter tersendiri sehingga memberikan peluang yang cukup besar bagi Indonesia. Chapter ini terdiri dari dua bagian utama yaitu cooperation (kerjasama) dan capacity building (peningkatan kapasitas) yang diharapkan akan meningkatkan daya saing produk dan jasa (termasuk sektor konstruksi) kedua belah pihak. Artikel cooperation dan capacity building mencakup beberapa hal sebagai berikut:

1. Pertukaran informasi



Sektor Konstruksi dalam IE CEPA

Sektor konstruksi Indonesia dalam perundingan IE CEPA merupakan sektor yang menjadi salah satu offer yang diajukan dalam kelompok perundingan perdagangan jasa (trade in services), kerjasama dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia (cooperation and capacity building) dan juga investasi (investment). Kementerian PUPR sebagai pembina sektor konstruksi Indonesia secara aktif terus mengikuti dan mengawal perkembangan komitmen sektor konstruksi dalam perundingan IE CEPA.

a. Progres Kelompok Perundingan Trade in Services (Femmy)

Perundingan Perdagangan Jasa (Trade in Services Meeting) dalam rangkaian Pertemuan bilateral Indonesia – EFTA Putaran Ke-11 ini berjalan dengan baik dan lancar, meskipun sempat mengalami kebuntuan



2. Pelatihan dan pertukaran tenaga ahli
3. Kerjasama pembiayaan seperti hibah
4. Pelatihan dan pembelajaran bersama
5. Fasilitasi transfer teknologi dan keterampilan
6. Penyelenggaraan seminar, workshop, konferensi, dan pemagangan
7. Dukungan untuk kerjasama pengaturan standar internasional
8. Kerjasama penilaian resiko, dan kerjasama lainnya

Untuk sektor jasa konstruksi, beberapa program kerjasama dan peningkatan kapasitas yang diusulkan kepada pihak EFTA ialah beasiswa pendidikan S2/S3, pelatihan dan sertifikasi internasional, joint operation proyek konstruksi di negara diluar EFTA dan Indonesia, dan pertukaran informasi, konsultasi, serta bantuan teknis.

Kelompok Perundingan CCB Dalam perundingan IE CEPA ke-11 tersebut menghasilkan beberapa keputusan bersama yaitu sebagai berikut:

1. Kedua belah pihak baik EFTA maupun Indonesia telah menyepakati kebutuhan kerjasama dalam rangka peningkatan kapasitas sumber daya manusia;
2. Dalam chapter of Cooperation and Capacity Building dicantumkan artikel terkait MoU program kerjasama dan peningkatan kapasitas. Kedua belah pihak lebih lanjut akan membahas apakah MoU tersebut sebagai bagian integral dari perjanjian;
3. Dalam pelaksanaannya, kedua belah pihak sepakat bahwa perjanjian terkait Cooperation and Capacity Building (CCB) diharapkan memiliki mekanisme evaluasi untuk setiap proyek CCB dan tidak terduplikasi satu sama lain;
4. Kedua belah pihak akan melanjutkan pembahasan terkait pengaturan keuangan dan bidang kerjasama yang nantinya sejalan dengan draf MoU Ekonomi dan Kerjasama Teknik;
5. EFTA akan mengkaji kembali semua proposal kerjasama dan peningkatan kapasitas yang berasal dari Indonesia sesuai dengan kebutuhan Indonesia;
6. Kedua belah pihak setuju bahwa akan dilaksanakan intersessional meeting melalui video/web conference sebelum pelaksanaan Perundingan IE CEPA yang ke-12.

c. Progres Kelompok Perundingan Investasi

Chapter investasi dalam perundingan IE CEPA mendapatkan fokus yang lebih besar karena erat kaitannya dengan arah kebijakan ekonomi Indonesia saat ini yaitu meningkatkan pertumbuhan Indonesia dengan mempererat kerja sama

perdagangan dan investasi. Presiden Jokowi telah menegaskan bahwa arah kebijakan ekonomi Indonesia difokuskan pada dua kata kunci yaitu keterbukaan dan persaingan.

Pertemuan kelompok perundingan investasi dihadiri oleh delegasi Indonesia yang dipimpin oleh Direktur Kerja Sama Bilateral dan Multilateral Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Fritz Horas Silalahi dan delegasi EFTA yang dipimpin oleh Kepala Divisi Investasi Internasional dan Perusahaan Multinasional, State Secretariat for Economic Affairs (SECO), Lukas Siegenthaler. Pokok pembahasan pada pertemuan tersebut adalah:

1. EFTA mengajukan permohonan untuk menggunakan pendekatan GATS pada Chapter Investasi;
2. Penentuan ruang lingkup dan definisi dari bab investasi;
3. Metode yang digunakan untuk mendaftarkan komitmen (EFTA meminta negative list sementara Indonesia mengajukan list of commitments);
4. Draft teks pada bab Investasi.

Pihak EFTA pada perundingan IE CEPA ke-11 menginginkan adanya peningkatan komitmen dari Indonesia dalam hal investasi yaitu (1) menyusun daftar komitmen yang ditampilkan dalam Daftar Negatif Investasi serta (2) pemberlakuan chapter investasi yang disamakan dengan Trade in Services. Untuk permohonan pertama, pihak Indonesia belum dapat menyetujui keinginan negara EFTA tersebut dan beropini bahwa untuk daftar investasi yang ditawarkan akan ditampilkan dalam positive list dengan menawarkan investasi awal pada 4 sub sektor yaitu farmasi, manufaktur, pertanian, dan perikanan. Sedangkan untuk permohonan kedua, Indonesia pada prinsipnya dapat menyetujui dengan syarat mengecualikan pengaturan tentang pembentukan kantor cabang dan perwakilan (joint operation).

Isu Perundingan IE CEPA Putaran 11

Perundingan IE CEPA Putaran ke-11 merupakan tindak lanjut perundingan sebelumnya dan wujud komitmen kedua belah pihak untuk menghasilkan kesepakatan bersama. Beberapa isu strategis dalam perundingan IE CEPA yang ke 11 ialah sebagai berikut :

1. Isu Perdagangan Jasa

Dalam konteks perdagangan jasa, kedua belah pihak menggarisbawahi moda terkait movement of natural persons dimana EFTA memiliki keinginan untuk dapat memasuki pasar tenaga kerja di Indonesia;

2. Isu Investasi

Pemahaman kedua belah pihak baik Indonesia dan EFTA terkait investasi masih belum menghasilkan kesepakatan bersama. Perlunya kajian yang lebih dalam untuk memastikan visi dan misi masing-masing negara tercapai dan saling menguntungkan;

3. Isu Kerjasama dan Peningkatan Kapasitas

Keinginan Indonesia untuk menjalin kerjasama dalam rangka peningkatan kapasitas sumber daya manusia Indonesia, disambut baik oleh pihak EFTA. Akan tetapi EFTA akan mengkaji kembali semua usulan proposal yang diberikan dan disesuaikan dengan kebutuhan Indonesia yang sesungguhnya.

Langkah selanjutnya

Pertemuan Perundingan IE CEPA Putaran Ke-12 direncanakan akan dilaksanakan pada bulan Februari 2017 di Jenewa, Swiss. Namun EFTA menginginkan agar diadakan pertemuan Intersessional antara Indonesia dan EFTA pada bulan Januari 2017 di Jakarta, Indonesia yang mencakup pembahasan lanjutan dari seluruh isu-isu pending.

Sehubungan dengan hal tersebut, Indonesia dalam hal ini K/L/I pembina sektor/subsektor diharapkan dapat lebih mengeksplorasi request kepada keempat negara anggota EFTA yang dapat menguntungkan dan bermanfaat bagi kemajuan Indonesia sehingga perjanjian IE CEPA ini meaningful dan dapat memberikan manfaat berkelanjutan bagi kedua belah pihak.**

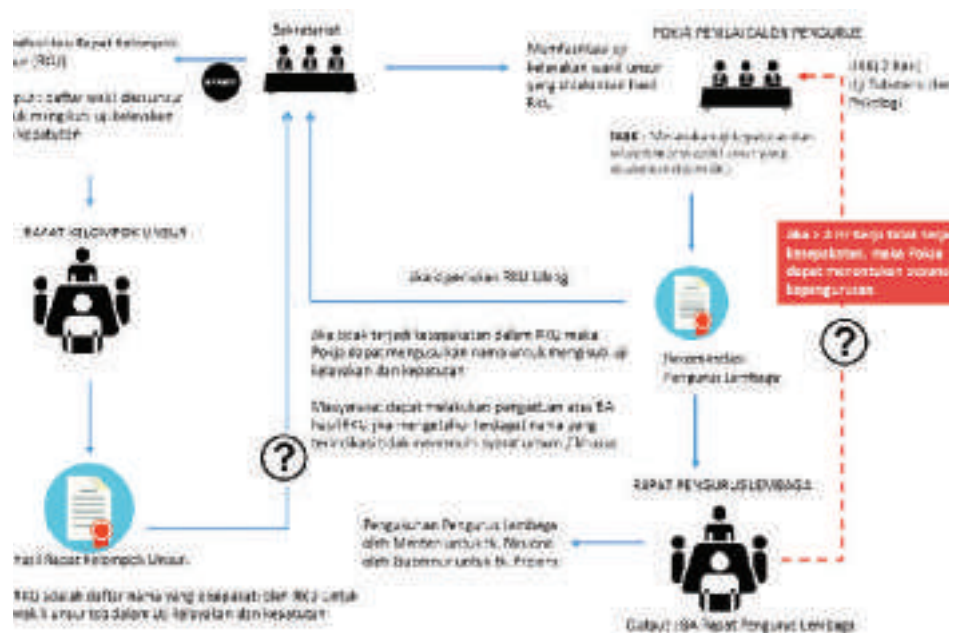


Uji Kelayakan dan Kepatutan Barometer Dalam Mencari Pengurus Lembaga Periode 2016-2020 yang Kompeten dan Berintegritas

Nurasih Asriningtyas & Catherine Sihombing

Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) adalah suatu lembaga yang dibentuk atas dasar amanat Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi. Dalam UU tersebut yang diperkuat dengan Peraturan Pemerintah Nomor 04 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi, ditegaskan bahwa lembaga ini adalah bagian dari bentuk partisipasi masyarakat jasa konstruksi. Pembentukannya didasarkan atas hasil pemilihan dengan masa bakti empat tahun. Masa bakti Pengurus LPJK Periode 2011-2015 telah berakhir sesuai amanat Keputusan Menteri PUPR No. 413/PRT/M/2015. Sehingga diperlukan adanya pergantian kepengurusan dengan landasan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 51/PRT/M/2015, untuk memilih Pengurus dengan masa bakti 2016-2020.

Untuk setiap calon yang diusulkan menjadi pengurus harus melalui tahapan proses pemilihan. Setidaknya dalam proses pemilihan tersebut terdapat tiga kegiatan utama yakni penetapan kelompok unsur Lembaga (Rapat Kelompok Unsur/RKU), penetapan pengurus Lembaga (Uji Kelayakan dan Kepatutan) dan penetapan dan pengukuhan pengurus Lembaga (oleh



Gambar 1 Proses Pemilihan Pengurus LPJK

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat untuk LPJK Nasional dan Gubernur untuk LPJK Propinsi).

Proses Pemilihan Pengurus Lembaga

Dari serangkaian proses pemilihan pengurus, tahapan pertama yang harus dilalui adalah mengusulkan nama-nama calon. Untuk mengusulkan nama calon, setiap asosiasi yang sudah mendaftar

dan dinyatakan memenuhi persyaratan administrasi dapat menyalonkan satu orang wakilnya guna mengikuti tahapan uji kelayakan dan kepatutan. Proses pencalonan dilakukan dalam sebuah forum bernama Rapat Kelompok Unsur (RKU). Asosiasi yang dinyatakan telah memenuhi persyaratan dituangkan dalam Keputusan Menteri PUPR Nomor 471/KPTS/M/2016 dan Nomor 472/KPTS/M/2016.

Tahapan selanjutnya adalah para calon diminta untuk melengkapi dokumen administrasi yang dibutuhkan guna dinyatakan memenuhi syarat mengikuti Uji Kelayakan dan Kepatutan (UKK). Dalam proses pemilihan pengurus Lembaga, Uji Kelayakan dan Kepatutan menjadi tolak ukur atas kapasitas, integritas dan profesionalitas calon yang ditentukan melalui hasil uji psikologi dan substansi. Kedua tahapan uji ini dilakukan oleh lembaga/kelompok kerja (Pokja) yang independen, profesional dan memiliki karakter integritas. Uji kelayakan dan kepatutan calon pengurus dilakukan selama dua hari.

Pada uji substansi setiap calon akan dinilai kemampuan dan pemahaman wawasan mengenai jasa konstruksi,





integritas, profesionalitasnya, kemampuan bekerja dalam tim dan komunikasi. Dalam uji substansi nasional, peserta dilakukan observasi secara langsung dengan pokok-pokok pemikiran yang terkait dengan pengembangan bisnis jasa konstruksi; keprofesian jasa konstruksi; produktivitas dan kompetensi sumber daya manusia konstruksi; teknologi konstruksi; rantai pasok konstruksi; investasi infrastruktur; dan sistem penyelenggaraan jasa konstruksi. Pada uji ini, calon dinilai oleh Pokja yang diamanatkan pada Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 470/KPTS/M/2016 tanggal 30 Juni 2016 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Penilai Pengurus Lembaga Tingkat Nasional dan Provinsi pada Tim Pemilihan Pengurus Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Periode 2016-2020

Adapun Pokja Penilai Pengurus Tingkat Nasional ditetapkan Menteri sebanyak 6 orang yaitu: Wibisono Setiowibowo, Dipl.DA, M.Sc sebagai Ketua Pokja, dengan anggota Pokja adalah Ir. Beti Alisyahbana, Prof. DR. Ir. Chaidir Makarim, M.SCE, DR. Imam B. Prasodjo, Ir. Abdul Wahab Bangkono, M.Sc, Komjen Pol (P) Drs. Oegroseno, SH

Untuk Tingkat Provinsi, Pokja Penilai Pengurus ditetapkan per provinsi dengan komposisi per wilayah Balai Jasa Konstruksi. Regional Balai Jasa Konstruksi Wilayah I Aceh yang mencakup wilayah Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau dan Kepulauan Riau diketuai oleh Ir. Panani Kesai, M.Sc, Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Konstruksi dengan anggota Siti Martini, SH, M. Si, Kepala Biro Hukum, Sekretariat Jenderal Kementerian PUPR. Regional Balai Jasa Konstruksi Wilayah II Palembang yang

mencakup wilayah provinsi Jambi, Bengkulu, Kepulauan Bangka Belitung, Sumatera Selatan, dan Lampung, diketuai oleh Ir. Ober Gultom, MT, Direktur Bina Investasi Infrastruktur, dengan anggota Prof. DR. Ir. Rizal Z. Tamin yang merupakan pakar praktisi dari Institut Teknologi Bandung (ITB).

Pokja Penilai Pengurus Tingkat Provinsi untuk regional Balai Jasa Konstruksi Wilayah III Jakarta yang mencakup wilayah Banten, Jawa Barat, DI Yogyakarta, dan DKI Jakarta yang diketuai oleh Ir.Yaya Supriyatna S.,M. Eng.Sc, Direktur Bina Kelembagaan dan Sumber Daya Jasa Konstruksi dengan anggota Wibisono Setiowibowo, Dipl.DA, M.Sc, praktisi yang merupakan mantan pejabat dari Badan Pembinaan Konstruksi. Regional Balai Jasa Konstruksi Wilayah IV Surabaya yang mencakup wilayah Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, NTB, dan NTB diketuai oleh Dr. Ir. Masrianto, MT, Direktur Bina Kompetensi dan Produktivitas Konstruksi dengan anggota Dr. Reini D Wirahadikusumah yang merupakan pakar dari perguruan tinggi Institut Teknologi Bandung (ITB). Regional Balai Jasa Konstruksi Wilayah V Banjarmasin mencakup wilayah Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Utara yang diketuai oleh Ir. Ismono, MA praktisi yang merupakan mantan pejabat dari Badan Pembinaan Konstruksi dengan anggota Dr. Akhmad Suradji yang merupakan pakar jasa konstruksi.

Pokja Penilai Pengurus Tingkat Provinsi untuk regional Balai Jasa Konstruksi Wilayah VI Makassar yang mencakup wilayah Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara, Sulawesi Barat, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, dan Gorontalo dengan ketua Dr. Ir. Darda

Daraba, M.Si, Direktur Bina Penyelenggaraan Jasa Konstruksi dengan anggota Ir. Dadan Krisnandar, MT

regional Balai Jasa Konstruksi Wilayah VII Jayapura mencakup wilayah Maluku, Maluku Utara, Papua, dan Papua Barat dengan ketua Ir. Dudi Suryo Bintoro, MM, Direktur Kerjasama dan Pemberdayaan dengan anggota Dr. Biemo W Soemardi yang merupakan pakar dari perguruan tinggi Institut Teknologi Bandung (ITB).

Selain ketua dan anggota yang ditetapkan sesuai diatas dalam keputusan Menteri PUPR Nomor 470/KPTS/M/2016, untuk setiap provinsi dianggotai juga Ketua Tim Pembina Jasa Konstruksi Provinsi (TPJKP). Diharapkan keterlibatan peran TPJKP sejak awal proses pemilihan pengurus Lembaga dimaksudkan agar terjadi sinergi kerjasama



sejak mula sejalan dengan mandat Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, mengenai peran daerah dalam pembinaan dan pengembangan Jasa Konstruksi.

Sedangkan uji psikologi, setiap calon dinilai kemampuan berfikir, bekerja dalam tekanan, bekerja dalam kelompok, kepribadian, perilaku kerja dan kepemimpinan sesuai dengan modul yang dimiliki oleh Tim Psikologi Independen. Pada tahapan ini, Ditjen Bina Konstruksi bekerja sama dengan Lembaga independen yakni Tim Psikologi dari Universitas Indonesia Fakultas Psikologi.

Jumlah calon yang mengikuti UKK Nasional adalah sebanyak 64 orang yang tercantum dalam berita acara Rapat Kelompok Unsur Perdana Tingkat Nasional. Namun setelah melalui proses verifikasi calon berupa administrasi dan masukan dari masyarakat, maka Pokja Penilai Pengurus Tingkat Nasional menetapkan 59 orang yang lulus verifikasi berkas dan dapat mengikuti UKK. Sedangkan untuk tingkat provinsi, dari 780 orang yang tercantum dalam berita acara Rapat Kelompok Unsur Perdana Tingkat Provinsi, pada tanggal 20 September 2016, Pokja Penilai Pengurus Tingkat Provinsi menetapkan yang lulus verifikasi dan dapat mengikuti uji kelayakan dan kepatutan ada 714 orang.

LPJK dan Tantangan ke depan

Dalam arahnya Direktur Jenderal Bina Konstruksi Yusid Toyib, saat membuka pelaksanaan Uji Kelayakan dan Kepatutan Tingkat Nasional dilaksanakan pada tanggal 22 September 2016, menegaskan bahwa proses pemilihan pengurus Lembaga ini

adalah murni, tidak ada intervensi dari pihak manapun, bersifat netral tidak ada pesanan dari kepentingan manapun. Dirjen berharap agar LPJKP dapat mengembangkan sistem pengawasan yang lebih ketat dalam mengeluarkan sertifikasi karena sertifikasi penting menghasilkan tenaga kerja yang dijamin keahliannya untuk mewujudkan konstruksi yang memiliki nilai keamanan, keselamatan, kesehatan dan keberlanjutan. Sertifikasi juga menjadi bagian dari upaya penghargaan yang lebih pantas (remunerasi) kepada para pelaku jasa konstruksi. Selain itu, LPJK juga harus melakukan pembinaan kepada stakeholdernya, dalam penyelenggaraan diklat yang lebih intensif dan mendorong litbang pengembangan jasa konstruksi dengan mengembangkan sistem pembiayaan kerjasama investasi dalam membangun yang tidak hanya mengandalkan sumber daya dari APBN/APBD.

Yusid menambahkan bahwa LPJK ke depan akan diperhadapkan pada berbagai tantangan yang tidak mudah. LPJK sebagai lembaga harus mampu melakukan pembinaan kepada para anggotanya untuk



Untuk tingkat nasional, dari 64 orang peserta Rapat Kelompok Unsur Perdana Tingkat Nasional, hanya 59 orang yang lulus



bisa bersama membangun konstruksi yang bermutu, berkelanjutan dan berdaya saing. Peran LPJK tidak semata pada proses sertifikasi dan registrasi. Tetapi lebih dari itu, yakni melakukan pengembangan arbitrase, kelitbangan dan diklat. Peran arbitrase menjadi penting bagi perlindungan kepada para pekerja konstruksi untuk mampu berkarya lebih inovatif dan taat kepada proses kontrak kerja yang telah disepakati bersama.

Sedangkan Uji kelayakan dan kepatutan Tingkat Provinsi dilaksanakan serempak tanggal 28-29 September 2016, di 7 wilayah Balai Jasa Konstruksi, yakni Medan, Palembang, Jakarta, Banjarmasin, Denpasar, Makasar dan Sorong. Pembukaan dilakukan serentak oleh Ketua Pokja Penilai Pengurus Tingkat Provinsi masing-masing regional, khusus untuk DKI Jakarta dibuka oleh Direktur Jenderal Bina Konstruksi. Dalam arahnya dalam UKK Tingkat Provinsi untuk regional Balai Jasa Konstruksi Wilayah III di Hotel SwissBell, Jakarta, Direktur Jenderal Bina Konstruksi berharap sebagai mitra Pemerintah, LPJK juga diharapkan dapat berperan lebih dan mengembangkan kerjasama yang sinergi dengan Pemerintah Pusat dan Daerah. Pada Uji Kelayakan dan Kepatutan Tingkat Provinsi ini yang dilakukan selama 2 (dua) hari dengan uji psikologi yang berupa tes tulis dan diskusi kelompok yang diobservasi juga oleh Pokja Penilai Pengurus Provinsi, serta uji substansi yang berupa ujian substansi tertulis dan tulisan singkat dengan tema terkait visi dan misi serta wawasan jasa konstruksi.

Dengan UKK ini diharapkan calon pengurus LPJK baik Tingkat Nasional dan Provinsi yang merupakan perwakilan dari 4 (empat) unsur yakni unsur asosiasi perusahaan, asosiasi profesi, perguruan tinggi dan/atau pakar, dan pemerintah merupakan calon terbaik yang amanah, kompeten, berintegritas tinggi, profesional dan selalu memprioritaskan kepentingan pengembangan jasa konstruksi, mengedepankan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi atau kelompok unsurnya, serta bersedia menjalankan tugas dan memberikan sumbangsih penuh kepada LPJK. Loyalitas dan integritas dari setiap pengurus yang bertugas selama empat tahun ke depan sangat diperlukan untuk mampu berkarya di nasional dan bersaing di kancah internasional agar sektor jasa konstruksi menjadi kokoh, handal dan berdaya saing dapat tercapai demi memajukan Industri Konstruksi Indonesia. Semua proses dapat dilihat pada situs resmi pemilihan pengurus lembaga yaitu <http://rekrutmenlpjk.pu.go.id>.



Katalog Produk Baja Konstruksi Sebagai Bahan Referensi Penggunaan Produk Baja Konstruksi Yang Memenuhi Standar Nasional Indonesia (SNI)

📖 Ir. Rusli, MT & Herry Kurniawan, ST, MT



Ketersediaan Infrastruktur yang baik merupakan salah satu faktor utama yang diperlukan dalam meningkatkan daya saing dan mendorong perekonomian suatu negara. Pembangunan infrastruktur diharapkan tidak sekedar dilihat sebagai pembangunan fisik infrastruktur saja, namun juga perlu diperhatikan bagaimana hasil keluaran (outcome) dan dampak setelahnya (impact). Dengan demikian, produk-produk infrastruktur yang dihasilkan nantinya dapat dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat dalam rangka peningkatan kesejahteraan



Penggunaan produk-produk baja dengan SNI dalam pekerjaan konstruksi akan meningkatkan jaminan kualitas produk konstruksi sehingga industri baja nasional dapat berdaya saing



hidup masyarakat.

Dalam hal penyelenggaraan infrastruktur, dukungan akan ketersediaan sumber daya konstruksi menjadi hal yang sangat penting agar prosesnya dapat berjalan secara efektif, efisien, dan tepat waktu. Salah satu sumber daya konstruksi

yang utama dan banyak digunakan di sektor konstruksi

adalah material baja. Sejalan dengan meningkatnya aktifitas penyelenggaraan infrastruktur, maka baja sangat dibutuhkan sebagai bahan utama penguatan struktur konstruksi. Selain memiliki kekuatan dan kekakuan yang unggul, sifat

daktilitas baja yang tinggi memungkinkan penampang baja mengalami perubahan bentuk dan deformasi secara berulang yang cukup besar tanpa mengurangi kemampuan memikul beban, terutama untuk menahan gaya gempa yang manfaatnya sangat nyata bagi sebagian besar wilayah Indonesia. Tentu saja, jaminan standar kualitas baja menjadi hal yang sangat penting untuk diperhatikan bagi seluruh pengguna, perencana, pembina dan penyelenggara konstruksi.

Secara umum pada proyek konstruksi yang menggunakan struktur baja, nilai material baja sekitar 11,24% dari nilai pekerjaan konstruksi. Di



Indonesia, penggunaan baja di bidang konstruksi sekitar 78% dari seluruh konsumsi baja nasional. Penggunaan baja tersebut 40% untuk pekerjaan konstruksi infrastruktur dan 38% pekerjaan konstruksi non infrastruktur. Penggunaan baja tulangan diperkirakan sekitar 32% dari total penggunaan baja konstruksi.

Penggunaan produk-produk baja dengan Standar Nasional Indonesia (SNI) dalam setiap pelaksanaan pekerjaan konstruksi tentu saja akan berdampak pada meningkatnya jaminan kualitas produk konstruksi dan meningkatnya penggunaan tingkat kandungan dalam negeri sehingga industri baja nasional dapat berdaya saing.

Sehubungan dengan maksud diatas, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat menerbitkan Katalog Baja Konstruksi 2015 yang memuat informasi mengenai produk baja

Indonesia, yang meliputi dimensi, standar komposisi kimia dan mekanika baja serta spesifikasi SNI yang menjadi acuan standar produk. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat melalui Direktorat Jenderal Bina Konstruksi telah menerbitkan buku Katalog Produk Baja Konstruksi Tahun 2015 pada tanggal 7 September 2016 bersamaan dengan kegiatan pameran Steel Indonesia Expo 2016 di Jakarta International Expo Kemayoran, Jakarta.

Direktur Jenderal Bina Konstruksi, Ir. Yusid Toyib, M.Eng.Sc dalam sambutannya menyampaikan bahwa Industri baja merupakan "mother of industry" oleh karena peran besarnya dalam mendukung penyelenggaraan sektor-sektor strategis lainnya seperti sektor konstruksi, sektor perhubungan, sektor pertambangan dan energi, sektor industri otomotif dan permesinan, sampai dengan sektor industri alat utama

sistem pertahanan. Selain itu, dengan diterbitkannya katalog baja konstruksi nantinya akan menjadi bahan referensi, informasi, dan edukasi bagi para pembina, perencana, penyelenggara, penyedia jasa, akademisi, dan asosiasi serta seluruh stakeholder dalam merencanakan dan menentukan jenis produk baja konstruksi yang akan digunakan sehingga mendorong penggunaan produk-produk baja dengan Standar Nasional Indonesia (SNI) dalam setiap pelaksanaan pekerjaan konstruksi dan pada akhirnya akan berdampak pada meningkatnya jaminan kualitas produk-produk konstruksi dan meningkatnya penggunaan tingkat kandungan dalam negeri (TKDN) sehingga industri baja nasional dapat berkelanjutan dan berdaya saing.

Penyajian Katalog Produk Baja Konstruksi 2015 sengaja dibuat menjadi beberapa bagian untuk memudahkan semua pihak yang berkepentingan dalam penggunaan katalog. Data dan informasi yang disampaikan dalam katalog telah disesuaikan dengan kebutuhan di sektor konstruksi. Sistematika penyusunan

Katalog Produk Baja Konstruksi 2015 ini meliputi klasifikasi produk baja konstruksi yaitu baja profil, baja plat, baja tulangan, baja pipa, komponen struktur, produk penyambung dan daftar perusahaan produsen produk baja sesuai dengan klasifikasinya

Katalog Produk Baja Konstruksi 2015 yang diterbitkan ini adalah sebagai wujud rasa kepedulian dan tanggung jawab Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dalam upaya memberikan dukungan terhadap perkembangan dan kemajuan sektor konstruksi di Indonesia. Selain itu, pemerintah perlu bekerjasama dengan seluruh pihak baik produsen, pengguna, akademisi, dan asosiasi terkait dalam memberikan informasi dan edukasi terkait baja konstruksi. Informasi yang jelas dengan memperhatikan hal-hal penting dalam mengoptimalkan penggunaan baja konstruksi dalam negeri yang baik dan tepat guna, sehingga dapat dicapai hasil produk konstruksi yang berkualitas dalam rangka mewujudkan industri konstruksi yang kokoh, andal dan berdaya saing tinggi.**





KONSTRUKSI RAMPING (LEAN CONSTRUCTION)

Menuju Konstruksi Indonesia yang Berdaya Saing

Erza Raihanza

Target infrastruktur yang begitu besar memberikan konsekuensi adanya suatu target produktivitas dalam pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur. Selain itu, untuk meningkatkan daya saing Indonesia secara internasional, produktivitas yang merupakan daya saing perlu mengalami peningkatan. Pemerintah sebagai pihak yang diberi amanat oleh undang-undang sebagai penyelenggara infrastruktur serta kementerian PUPR yang menjadi tonggak penggerak infrastruktur Indonesia memiliki kewajiban untuk dapat terselenggaranya infrastruktur sesuai dengan target RPJMN 2015-2019.

Banyak cara yang dapat digunakan untuk meningkatkan efisiensi, efektifitas dan produktivitas sektor konstruksi, salah satunya adalah penerapan prinsip Konstruksi Ramping (Lean Construction).

Prinsip Konstruksi Ramping

Konstruksi ramping lahir dari ide

"ramping" pada sektor industri yang pertama kali diterapkan oleh Toyota yang kemudian disebut sebagai prinsip ramping oleh James Womack pada akhir 1980. Lean merupakan metodologi yang berdasarkan kepada kepuasan pelanggan atas produk yang dihasilkan dengan penggunaan sumber daya yang efektif dan perbaikan yang berkelanjutan.

Terdapat lima langkah dalam menerapkan prinsip berfikir secara lean :

1. Specify Value
2. Identify the Value Stream
3. Make Value-Creating Steps Flow
4. Customer Pull Products or Services from the Value Stream
5. Perfection

Selain itu, dalam memandang pendekatan yang untuk memahami Konstruksi Ramping, Koskela (1992) menjelaskan terdapat tiga jenis pendekatan proses model produksi yang dapat digunakan terhadap Konstruksi Ramping yaitu:

- Proses Conversion
- Proses Flow
- Proses Value

Prinsip utama dari pola pikir ramping adalah setiap kegiatan yang menggunakan sumber daya tetapi tidak menciptakan value dianggap sebagai waste. Waste dapat dihasilkan dari berbagai aktivitas:

- Kesalahan yang membutuhkan perbaikan
- Produksi sesuatu yang tidak diperlukan sehingga terjadi penumpukan inventory dan sisa produksi
- Langkah-langkah dalam proses yang tidak diperlukan
- Pergerakan pekerja dan perpindahan barang tanpa tujuan yang jelas
- Sekelompok pekerja di kegiatan sesudah berdiri menunggu karena kegiatan sebelum tidak tepat waktu
- Barang dan jasa yang tidak memenuhi kebutuhan pelanggan

Aktivitas-aktivitas tersebut memicu timbulnya waste pada pekerjaan. Prinsip

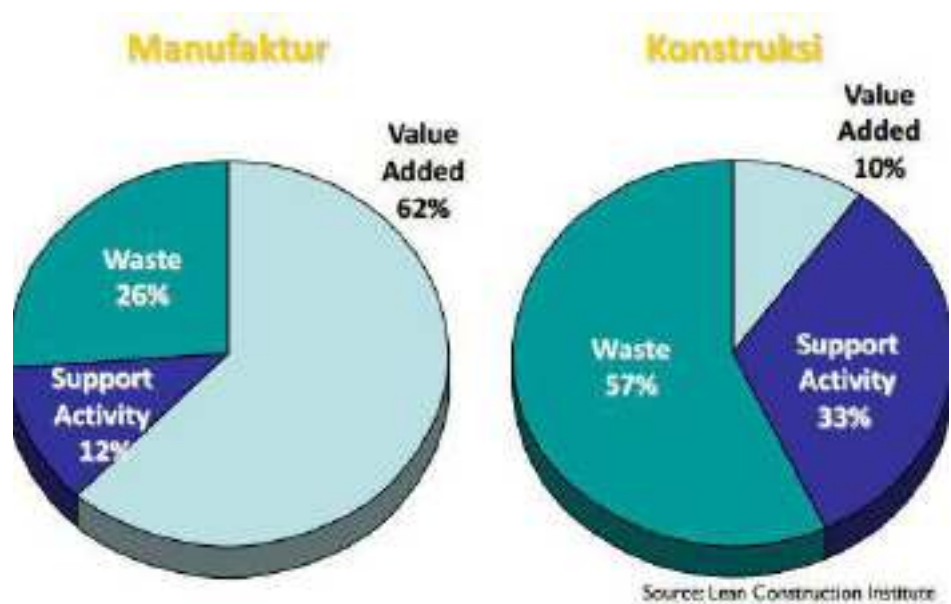
Tabel 1 Komparasi Teknik Lean Construction yang direkomendasikan

Enabler	Status	Recommendations
Last Planner	Siap diterapkan	1. Mengedepankan pada penjadwalan fase mundur 2. Mengedepankan analisis variansi
Visualization	Dapat diterapkan dengan beberapa modifikasi	1. Pendekatan terintegrasi 2. Keselamatan-Kualitas-Housekeeping
Daily Huddle Meetings	Dapat diterapkan dengan beberapa modifikasi	Perubahan frekuensi dari pertemuan dengan grup yang lebih kecil
First Run Studies	Dapat diterapkan dengan beberapa modifikasi	1. Integrasikan dengan pertemuan scrum (Tool Box Meetings) 2. Mendokumentasikan proses belajar
The 5s Process	Dapat diterapkan dengan beberapa modifikasi	Pembenahan dapat dikaitkan dengan peningkatan visualisasi
Fail safe for quality and safety	Untuk di kaji ulang	1. Gunakan kondisi lapangan dan lingkungan kerja 2. Gunakan kualitas pada sumbernya

Sumber: Diadaptasi dari Salem, o et. al. (2005)

langsing (Lean) pada konstruksi pertama kali diperkenalkan oleh Lauri J. Koskela tahun 1992. Penerapan prinsip ramping ditujukan untuk memperbaiki kinerja industri konstruksi dengan mengacu pada industri manufaktur dengan pendekatan Lean Production. Filosofi dari konstruksi ramping lebih lanjut dikembangkan oleh masyarakat peneliti dan praktisi konstruksi yang tergabung didalam International Group for Lean Construction (IGLC) pada tahun 2013. Penelitian kemudian difokuskan pada proses produksi di lapangan dengan adanya teknik-teknik konstruksi ramping seperti The Last Planner System (LPS) hingga merambah kepada penyelenggaraan konstruksi secara holistik dengan Integrated Project Delivery-nya (IPD).

Industri manufaktur dan industri konstruksi merupakan dua jenis industri yang berbeda. Jika ditinjau dari proses pembentukan produknya, industri manufaktur melakukan proses yang terfokus pada suatu area kerja (workshop) yang sudah tersistem sedemikian rupa dengan produk yang berjalan dari setiap proses produksinya sementara industri konstruksi dalam



menghasilkan suatu produk terfokus pada suatu situs kerja yang proses produksinya didatangkan pada situs kerjanya.

Hal ini kemudian mengharuskan penerapan Lean Production di industri konstruksi dimodifikasi sehubungan dengan karakteristik konstruksi. Penerapannya

terfokus pada bidang manajemen (daur hidup proyek dan komponen-komponennya) maupun rekayasanya (proses konstruksi dan komponennya). Penerapan dalam seluruh daur hidup proyek kemudian menjadi apa yang disebut sebagai Lean Project Delivery System.

DEMAND

TARGET INFRASTRUKTUR YANG HARUS DIBANGUN 2015 - 2019

- Pembangunan BRT di 29 kota
- Pembangunan angkutan massal cepat di kawasan perbatasan 18 Kota metropolitan (tan. 17 Kota Besar)
- Rencananya 5.257 twinblok (515.711 rumah tangga)
- Bantuan stimulan perumahan swadaya 3,5 juta rumah tangga
- Perancangan kawasan rumah 37.407 Ha
- Fasilitas kredit perumahan untuk MBR 2,5 juta rumah tangga

- Pembangunan 15 bandara baru
- Pengadaan 20 pesawat perintis
- Pengembangan bandara untuk pelayanan Cargo Udara di 6 lokasi
- Pembangunan 24 Pelabuhan baru
- Pengadaan 26 Kapal Basah perintis
- Pengadaan 2 Kapal Ternak
- Pengadaan 500 unit Kapal Bakul
- Pembangunan 65 Waduk baru & 33 PLTA
- Pembangunan/peringkatan jaringan irigasi 1 juta Ha
- Rehabilitasi 3 juta Ha jaringan irigasi

- Pembangunan Pelabuhan pengembangan di 60 lokasi
- Pengadaan kapal penyebrangan perintis sebanyak 50 unit
- Jalan baru 2.350 Km
- Jalan tol 1.000 Km
- Pemeliharaan jalan 46.770 Km
- Pembangunan Jalur KA 3.250 Km di Jawa, Sumatera, Sulawesi, dan Kalimantan terdiri dari KA Antar kota 2.159 km, KA Perkotaan 1.099 Km

Tabel 2 Rangkuman Hasil Simulasi
The Last Planner System menggunakan perangkat simulasi Villego®

Hasil	Babak	Rata-Rata (Banten)	Persentase Perubahan (Banten)	Rata-Rata (Banten)	Persentase Perubahan (Bali)
Waktu Konstruksi (menit)	I	13,67	-68%	20,00	-78%
	II	4,33		4,33	
Produktivitas (elemen/menit)	I	7,17	214%	5,96	234%
	II	22,50		19,90	
Jumlah subkontraktor pada area kerja >2	I	0,00	-	2,00	-100%
	II	0,00		0,00	
Safety Breaches	I	0,00	-	2,00	-83%
	II	0,00		0,33	
Jumlah material yang digunakan kembali (reuse)	I	37,33	-32%	41,33	-77%
	II	25,33		9,33	
Waste	I	52,00	-51%	26,00	-72%
	II	25,33		7,33	

Secara umum, Konstruksi Ramping adalah proses penerapan prinsip-prinsip Lean untuk menciptakan nilai tambah yang dapat memuaskan owner proyek dan meningkatkan efisiensi dalam pelaksanaan konstruksi (Lean Construction Institute)

Teknik Konstruksi Ramping

Dalam menerapkan Konstruksi Ramping di Industri Konstruksi, dapat digunakan beberapa teknik untuk meminimalkan waste, antara lain:

- Work structuring
- Stream value mapping
- Built-in Quality
- Just in time
- Last planner system
- Supply chain management
- Takt time planning
- Partnering
- Alliance
- Target Value Pricing
- Integrated Project Delivery

Dari beberapa metode yang digunakan, dapat Salem, O. Et. AL (2005) membandingkan terkait penggunaan beberapa metode Lean Construction yang telah ada pada saat itu. Hasil komparasi kemudian menjadi status untuk pemanfaatan metode Konstruksi Ramping dan timbul rekomendasi untuk pengembangan metode yang telah ada.

Teknik-teknik Konstruksi Ramping tersebut digunakan untuk dapat mendukung tercapainya:

- Mendukung pengurangan untuk hal-hal positif dan mereduksi pengurangan negatif selama proses konstruksi.
- Memaksimalkan value dan meminimum-

kan waste selama penyelenggaraan konstruksi.

- Perbaikan performa proyek konstruksi secara keseluruhan.
- Mengukur performa dan melakukan perbaikan dari perencanaan dan kontrol.
- Ketepatan biaya, Lebih sedikit change order, ketepatan waktu, Lebih sedikit kecelakaan, Lebih sedikit perselisihan, Hasil pekerjaan yang lebih baik.

Pengenalan Masyarakat Konstruksi Terhadap Konstruksi Ramping

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melaksanakan workshop dan sosialisasi Lean Construction sebagai salah satu kegiatan yang menunjang tugas dan fungsinya guna mencapai masyarakat konstruksi Indonesia yang berdaya saing.

Dalam memperkenalkan Lean Construction kepada masyarakat konstruksi Indonesia, narasumber (Muhammad Abduh, Ph.D. dan tim fasilitator ITB) menyelenggarakan beberapa simulasi untuk memperkenalkan manfaat dari penggunaan prinsip Konstruksi Ramping. Salah satu teknik utama yang diperkenalkan adalah teknik The Last Planner System. Dalam memperkenalkan The Last Planner System ini digunakan simulasi menggunakan perangkat simulasi Villego®.

Workshop dan Sosialisasi Lean Construction dilaksanakan sebanyak dua kali. Workshop dan sosialisasi pertama dilaksanakan di Banten pada 1 hingga 2 September 2016 dengan jumlah peserta sebanyak 42 orang. Peserta merupakan

gabungan dari kontraktor, konsultan dan konsultan MK (Manajemen Konstruksi) yang berdomisili di bagian barat Indonesia.

Dalam pelaksanaannya, peserta workshop mendapatkan paparan dari narasumber yang kemudian dilanjutkan dengan beberapa permainan yang mensimulasikan betapa pentingnya fase perencanaan dalam eksekusi suatu pekerjaan.

Kegiatan simulasi-simulasi yang dilakukan mendapatkan antusiasme yang besar dari peserta workshop. Sifat workshop yang terdiri dari permainan-permainan simulasi memicu timbulnya interaksi antara anggota tim pada workshop. Selain mendapatkan pemahaman terkait Konstruksi Ramping, para peserta workshop juga mendapatkan pengalaman berharga dan komunitas menuju masyarakat Konstruksi Ramping di Indonesia.

Workshop dan Sosialisasi Lean Construction kedua dilaksanakan di Bali pada 21 hingga 22 September 2016 dengan jumlah peserta sebanyak 43 orang. Peserta workshop kedua terdiri dari pihak kontraktor, konsultan dan konsultan MK yang difokuskan berdomisili di bagian Indonesia tengah hingga ke timur.

Pada kegiatan kedua ini, workshop dijalankan dengan rangkaian kegiatan yang sama dengan workshop pertama di Banten. Antusiasme yang besar juga akan materi workshop dapat terlihat pada semangat peserta dalam mengikuti workshop yang berlangsung selama 2 hari.

Hasil dari kegiatan simulasi menggunakan metode Last Planner System dengan bantuan alat simulasi Villego® menunjukkan adanya peningkatan pada beberapa aspek produktivitas konstruksi.

Diharapkan kedepannya, kerjasama yang baik antara Direktorat Jenderal Bina Konstruksi dan Institut Teknologi Bandung ini dapat menjadi salah satu pionir untuk meningkatkan produktivitas konstruksi di Indonesia.*



**Penerapan Lean
Production di industri
konstruksi dimodifikasi
sehubungan dengan
karakteristik konstruksi.**



Tertib Penyelenggaraan Konstruksi Ditentukan dari Tertibnya Pokja ULP

Bidang Pengadaan Barang dan Jasa di Lingkungan Kementerian PUPR

Direktorat Jenderal Bina Konstruksi memiliki Target rencana strategis yang salah satunya adalah meningkatnya tertib penyelenggaraan konstruksi sebesar 9% ditahun 2016 dan kumulatif 40% pada tahun 2019. Target ini menjadi tugas utama Direktorat Bina Penyelenggaraan Jasa Konstruksi untuk mewujudkannya. Untuk mendukung tertib penyelenggaraan konstruksi tersebut maka perlu adanya suatu alat ukur untuk mengetahui tingkat tertib penyelenggaraan konstruksi bidang Pengadaan Barang/Jasa (PBJ).

Untuk mendukung tugas tersebut maka diterbitkan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) 2016 yang berfokus kepada: perluasan konsep dan pendekatan pengadaan barang/jasa dari manajemen pengadaan barang/jasa (procurement management) menjadi manajemen rantai penyediaan barang/jasa (supply chain management).

Adanya kebutuhan untuk menyetarakan kualifikasi dan standar kompetensi SKKNI PBJ dengan kualifikasi dan standar kompetensi negara lain, baik secara nasional maupun internasional; serta Adanya kebutuhan untuk merumuskan SKKNI PBJ dalam rumusan yang lebih "generik" agar SKKNI PBJ tidak cepat menjadi ketinggalan karena perubahan regulasi, kebijakan maupun teknologi pengadaan barang/jasa.

Tidak hanya itu, tertib penyelenggaraan juga terlihat dari adanya perubahan Fokus pelaksanaan pemantauan dan evaluasi dari semula hanya berfokus pada pelaksanaan Proyek menjadi pemantauan dan evaluasi kepada Institusi/Para Pihak penyelenggaraan proyek dan juga pelaksanaan proyeknya (Satker, PPK, Pokja dan PPHP) di lingkungan kementerian PUPR.

Terhitung pada Tahun 2016 Kementerian PUPR memiliki total lebih dari 10ribu paket yang harus dilelangkan dengan pagu sekitar 80 triliun. Dan karena itu Unit Layanan Pengadaan (ULP) menjadi ujung tombak dalam proses pengadaan barang/jasa Kementerian PUPR. ULP yang dimiliki Kementerian PUPR adalah 35 ULP dengan 747 Pokja dengan asumsi masing-masing

Pokja terdiri dari 5 orang anggota termasuk ketua pokja. Dengan besarnya SDM ULP dan Pokja yang terlibat, maka diperlukan satu kesatuan pandangan dan keseragaman langkah dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa di kementerian PUPR.

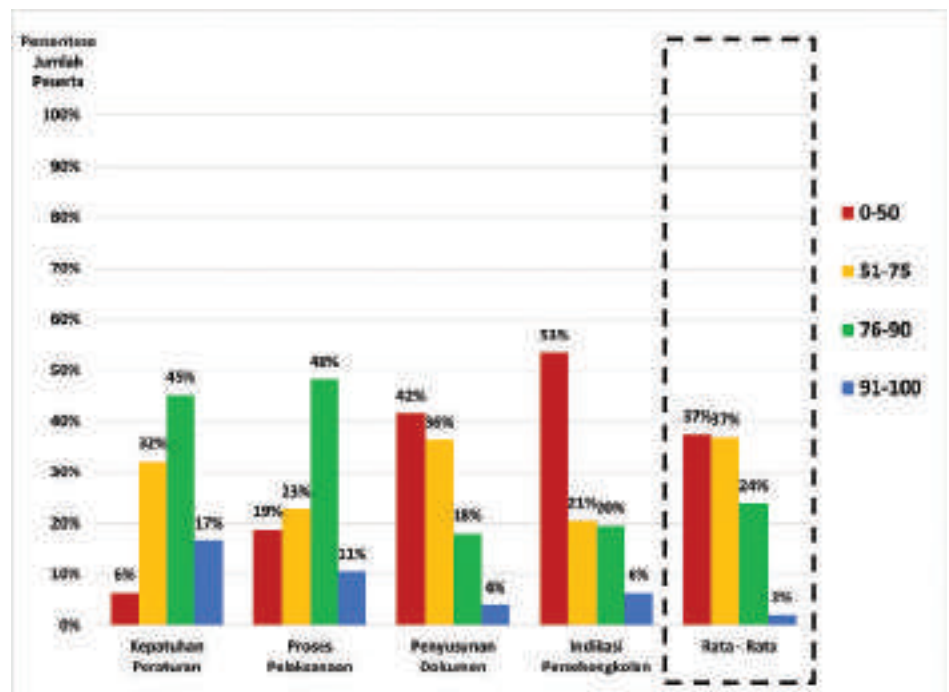
Untuk itu, dibuatlah Knowledge test pada rapat koordinasi ULP dan Pokja di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, yang dilaksanakan pada Kamis (5/9/2016). Uji kompetensi tersebut ditujukan untuk mengetahui kompetensi para pihak yang terlibat dalam proses pengadaan barang/jasa pemerintah dari segi knowledge. Uji kompetensi ini berbasis teknologi informasi yang dapat diakses melalui aplikasi android dan website.

Hasil dari ujicoba knowledge test yang dilaksanakan dalam acara Rapat Koordinasi Unit Layanan Pengadaan (Ulp) dan Kelompok Kerja (Pokja) di Lingkungan Kementerian

Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dapat dilihat dalam grafik dibawah ini:

Jika dikembalikan lagi berbicara tentang Tertib Penyelenggaran Konstruksi bidang PBJ maka yang perlu diperhatikan adalah implementasi terhadap 4 aspek dalam bidang penyelenggaraan konstruksi, yang terdiri atas: Menyelenggarakan Konstruksi bidang PBJ sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, Mematuhi Prosedur PBJ, Menyusun dokumen pengadaan yang lengkap, jelas dan rinci (detail), serta Menghindari segala bentuk Indikasi Persekongkolan.

Dengan tingginya kompetensi dari para pokja diharapkan dapat meningkatkan tertib penyelenggaraan konstruksi di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.*



Keterangan:

- 0 – 50 (Mengikuti Pelatihan Terkait Secara Tatap Muka)
- 51 – 75 (Mengikuti Pelatihan Terkait Secara Online & Tatap Muka)
- 76 – 90 (Mengikuti Pelatihan Terkait Secara Online)
- 91 – 100 (Diikutsertakan Pada Pelatihan Sebagai Trainer)

Social Marketing: Optimalisasi Produk Dirjen Bina Konstruksi

 Hasfarm Dian Purba

Pemerintah saat ini memiliki komitmen yang besar untuk menyediakan layanan infrastruktur bagi masyarakat luas. Hal ini terlihat dari alokasi anggaran yang meningkat cukup signifikan dua tahun terakhir. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sebagai salah satu institusi yang core business-nya ialah penyediaan infrastruktur merasakan dampak komitmen pemerintah.

Berdasarkan data yang dihasilkan oleh Bappenas (2015), kebutuhan pembiayaan infrastruktur PUPR 2015-2019 sebesar Rp. 1.915 Triliun atau sekitar 39,93% dari total kebutuhan pembiayaan infrastruktur nasional. Alokasi pembiayaan tersebut akan direalisasikan kedalam target-target pembangunan infrastruktur bidang PUPR hingga tahun 2019, seperti sektor sumber daya air, sektor jalan, sektor cipta karya, dan sektor perumahan. Besarnya tugas yang diemban oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat menunjukkan sebuah harapan besar pemerintah untuk terwujudnya Indonesia Sejahtera. Kualitas dan Kuantitas infrastruktur yang dibangun menjadi tolak ukur keberhasilan program pemerintah.

Pencapaian tersebut dapat terlaksana dengan hadirnya Direktorat Jenderal Bina Konstruksi sebagai institusi yang melakukan pembinaan terhadap sektor konstruksi. Konstruksi merupakan bagian dari pembangunan infrastruktur yang tak terpisahkan (inseparable factor). Jika berbicara mengenai sektor konstruksi, kita tidak hanya terpaku pada penyelenggaraan jasa konstruksi tetapi juga elemen-elemen lain seperti pembiayaan infrastruktur (investasi), sumber daya jasa konstruksi, kompetensi tenaga kerja sektor konstruksi, dan pemberdayaan semua stakeholder terkait.

Direktorat Jenderal Bina Konstruksi telah menyusun rangkaian program-program untuk mendukung terwujudnya



infrastruktur PUPR yang handal. Program-program direalisasikan melalui kegiatan-kegiatan swakelola maupun kontraktual. Hal inilah yang menjadi produk dari Direktorat Jenderal Bina Konstruksi.

Program-program tersebut menjadi target dari Direktorat Jenderal Bina Konstruksi dalam melakukan pengaturan, pemberdayaan, dan pengawasan sektor konstruksi khususnya bidang PUPR. Secara detail, program-program tersebut menghasilkan produk yang siap ditawarkan kepada masyarakat luas seperti:

- a. Human Resources Development (tenaga kerja konstruksi)
 - Sertifikasi tenaga kerja konstruksi ahli dan terampil

- Penyetaraan MRA (mutual recognition arrangement)
- b. Corporate Development (badan usaha jasa konstruksi)
 - Peningkatan jumlah BUKK kualifikasi besar berkinerja baik sebesar 125 BUKK



- c. Material and Technology Development (material dan peralatan)
 - Penggunaan 30% beton pracetak
 - Peningkatan penggunaan teknologi dalam negeri
- d. Business Environment Development (penyelenggaraan jasa konstruksi)
 - Penerapan manajemen mutu dan tertib penyelenggaraan konstruksi sebesar 40%
- e. Institutional and Building Development (lembaga jasa konstruksi)
 - Peningkatan kapasitas kelembagaan jasa konstruksi
 - Peningkatan peran masyarakat yang berkualitas dalam pelaksanaan kebijakan konstruksi
- f. Infrastructure Investment Development (investasi infrastruktur)
 - Peningkatan peran pemerintah dengan badan usaha dalam kerjasama penyediaan dan pembangunan infrastruktur (KPBU)
 - Peningkatan kapitalisasi konstruksi sebesar 15% hingga 2019

Lalu yang menjadi pertanyaan, bagaimana menjual produk-produk Direktorat Jenderal Bina Konstruksi tersebut kepada masyarakat luas? Jawabannya ialah menggunakan pendekatan social marketing. Menurut Andreassen (2002), social marketing merupakan suatu penerapan prinsip dan teknik pemasaran dalam rangka mendesain suatu program untuk mempengaruhi seseorang/masyarakat dalam merubah perilakunya secara sukarela dalam rangka meningkatkan kesejahteraan. Dari pengertian ini dapat kita tekankan bahwa tujuan utamanya ialah sebuah perubahan.

Konsep ini memang cukup jarang digunakan dalam instansi pemerintahan (birokrasi). Hanya beberapa Kementerian/Lembaga yang menggunakan social marketing sebagai cara memasarkan produk/

jasa kepada masyarakat luas, seperti program KB dari BKKBN, program jaminan kesehatan/ketenagakerjaan oleh BPJS, program anti narkoba oleh BNN, dsb. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat melalui Direktorat Jenderal Bina Konstruksi dapat mengaplikasikan konsep social marketing sebagai media untuk memasarkan produk/jasa dalam pembinaan konstruksi.

Salah satu produk yang dapat menggunakan pendekatan social marketing ialah KPBU (Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha). Kehadiran KPBU dalam skenario pembangunan merupakan langkah tepat untuk mencapai target-target pemenuhan infrastruktur bagi masyarakat luas. Pendekatan social marketing akan mendeliver KPBU kepada masyarakat khususnya pemerintah pusat/daerah dan swasta (badan usaha) sebagai sebuah gagasan untuk mengubah perilaku dan persepsi terhadap pembiayaan infrastruktur (changing paradigm). Konsep ini dapat diaplikasi dengan menggunakan empat variabel dalam pemasaran komersial atau dapat disebut marketing mix (Kotler dan Zaltman, 1971), yaitu:

1. Product

Jika didefinisikan secara sederhana, produk merupakan segala sesuatu yang ditawarkan kepada pasar untuk mendapatkan perhatian, diperli, dipergunakan, dan dimanfaatkan untuk mampu memuaskan keinginan atau kebutuhan (Kotler & Armstrong, 1996). Untuk konteks social marketing (pemasaran sosial), produk yang dijual ialah core product atau keuntungan dari perilaku yang ditawarkan. Dalam hal ini, core product ialah KPBU. Dalam core product ini dapat dijelaskan juga apa saja proyek-proyek yang siap ditawarkan kepada investor

2. Price

Price atau harga dalam konsep social marketing adalah biaya atau pengorbanan yang harus dikeluarkan oleh individu untuk mengadopsi perilaku yang ditawarkan.

Variabel harga disini lebih mengacu kepada nilai investasi dari setiap proyek-proyek yang ada dalam KPBU

3. Place/Distribution

Place/Distribution adalah saluran/tempat distribusi bagi pemasar (Direktorat Jenderal Bina Konstruksi) dalam rangka menyampaikan produk yang ditawarkan. Dalam social marketing, yang berperan sebagai place/distribution ialah PJP (penanggung jawab proyek kerjasama) di masing-masing sektor.

4. Promotion

Promosi merupakan bagian terpenting dari konsep social marketing. Direktorat Jenderal Bina Konstruksi harus mampu melihat perilaku investor terhadap produk yang ditawarkan. Jika promosi digunakan secara efisien dan tepat, maka KPBU akan berjalan lebih efektif dan sesuai dengan tujuan.

Social Marketing menjadi konsep pemasaran yang tepat bagi Direktorat Jenderal Bina Konstruksi untuk mendapatkan "customer"-nya. Konsep ini akan mempengaruhi individu atau kelompok yang dituju untuk mengubah perilakunya berdasarkan keinginannya sendiri. Oleh karena itu, beberapa hal penting yang perlu diperhatikan demi keberhasilan konsep ini ialah sebagai berikut :

1. Direktorat Jenderal Bina Konstruksi harus berorientasi kepada target customer
2. Diperlukan kemampuan persuasif pada setiap pemasar (marketing officer) di Direktorat Jenderal Bina Konstruksi
3. Program social marketing didasarkan pada penelitian pendahuluan dan disesuaikan dengan tren pasar
4. Menyusun desain-desain program pemasaran yang inovatif dan intervensi
5. Memperkuat saluran distribusi (place) yang mampu menarik perhatian dan membangun kepercayaan customer
6. Menggunakan marketing mix secara komprehensif
7. Melaksanakan evaluasi dan monitoring
8. Melakukan pengelolaan yang menyeluruh dan terintegrasi terhadap program pemasaran yang dibuat

Dengan menggunakan pendekatan social marketing, maka semua produk maupun jasa yang dihasilkan oleh Direktorat Jenderal Bina Konstruksi dapat langsung dirasakan oleh semua pihak.*



Kementerian PUPR Sertifikasi 1800 TENAGA KERJA KONSTRUKSI Secara Serempak



Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono mengatakan bahwa, salah satu upaya peningkatan SDM jasa konstruksi adalah dengan melakukan sertifikasi dan sosialisasi terkait pentingnya tenaga kerja konstruksi bersertifikat. Sertifikasi

tenaga kerja konstruksi menurut Menteri PUPR bertujuan untuk melindungi tenaga kerja nasional agar memiliki nilai tambah dan siap dalam menghadapi liberalisasi perdagangan ASEAN 2015 dan Asia Pasifik 2020, serta melindungi BUK nasional agar memiliki tenaga kerja yang kompeten dan produktif.

Sebagai tindak lanjut langkah percepatan sertifikasi tersebut, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat melalui Direktorat Jenderal Bina Konstruksi (DJBK) menyelenggarakan Uji Kompetensi dan Sertifikasi Tenaga Kerja Terampil dan Bimbingan Teknis Tenaga Ahli.

Direktur Jenderal Bina Konstruksi



Kementerian PUPR, Yusid Toyib resmi membuka kegiatan tersebut pada Rabu (26/10). Diselenggarakan di Pintu VII Gelora Bung Karno Jakarta, kegiatan ini diikuti oleh sebanyak 1.989 peserta yaitu 1.737 peserta Sertifikasi Tenaga Kerja Terampil serta 252 peserta Bimbingan Teknis Tenaga Ahli. Proses uji kompetensi dan sertifikasi tenaga kerja terampil dilakukan dengan metode pengamatan di lapangan yang akan dilakukan oleh Tim Asesor dari LPJKN dan LPJKP.

Tenaga kerja konstruksi yang disertifikasi pada kegiatan ini adalah para pekerja di kegiatan-kegiatan strategis di internal Kementerian PUPR dan proyek strategis BUMN dan swasta lainnya. Proses sertifikasi dilaksanakan melalui teleconference. Pelaksanaan sertifikasi dilakukan on site di 12 lokasi proyek. Seremonial pembukaan dilakukan secara bersamaan dengan lokasi peserta berada di tiga tempat yaitu Gelora Bung Karno, Tol Cisumdawu, serta Gedebage.

Yusid mengatakan bahwa dengan diadakannya kegiatan ini menunjukkan pentingnya peran pembinaan jasa konstruksi untuk menciptakan tenaga kerja yang berdaya saing tinggi dan siap menghadapi persaingan global. Ia juga menegaskan kepada para tenaga kerja konstruksi untuk



Tenaga kerja konstruksi yang disertifikasi pada kegiatan ini adalah para pekerja di kegiatan-kegiatan strategis di internal Kementerian PUPR dan proyek strategis BUMN dan swasta lainnya



dapat menerapkan Sistem Keselamatan Dan Kesehatan Kerja (SMK3) dalam menjalankan pekerjaannya.

“Jangan lupa untuk menerapkan SMK3 setiap kali bekerja karena itu untuk kebaikan kita sendiri. Jangan hanya karena proyeknya diawasi oleh pemilik modal asing” tegas Yusid Toyib.

Hal tersebut ditegaskan oleh Yusid Toyib mengingat kecelakaan konstruksi dan kegagalan bangunan yang terjadi





pada bangunan dan proyek infrastruktur. Seperti contohnya, runtuhnya jembatan penyeberangan orang di Pasar Minggu, robohnya atap bandara Terminal 3 Ultimate, robohnya Jembatan Kuning di Klungkung Bali dan robohnya jembatan Sekarteja di Lombok Timur yang menyebabkan korban jiwa.

Kurangnya kompetensi pekerja konstruksi menjadi salah satu penyebab terjadinya kegagalan bangunan dan kecelakaan konstruksi. Oleh karena itu, DJBK terus mendorong adanya sertifikasi, sehingga kualitas serta kehandalan pekerja konstruksi dapat dijamin. Untuk itu pula DJBK mendorong berbagai variasi model pelatihan yang difokuskan kepada jabatan kerja kunci yaitu manajer proyek, pengawas, mandor dan tukang. Sedangkan model pelatihannya antara lain dengan menggunakan model distance learning seperti pelatihan dengan menggunakan Mobile Training Unit (MTU), seminar dan kursus singkat, serta uji sertifikasi yang dilanjutkan dengan memberikan sertifikat terus ditingkatkan DJBK guna mencapai target tenaga kerja konstruksi bersertifikat di tahun 2019.

“Sertifikasi kompetensi adalah target utama kita di masa mendatang. Ini untuk kebaikan dan kemajuan kita bersama. Mari kita tunjukkan pada dunia bahwa anak-anak bangsa Indonesia mampu bekerja berkualitas dan menghasilkan produk konstruksi yang membanggakan”, tegas Yusid.*



Pekerja Konstruksi Menghadapi MEA

Diperkirakan realisasi program Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) akan meningkatkan pengaruh lalu lintas dan keluar masuknya pekerja di berbagai Negara Asean ini. Di bidang bangunan, pekerja Indonesia sesungguhnya sudah cukup lama berkiper di Negara-negara Asia seperti Malaysia, Korea, Taiwan maupun di berbagai Negara di Timur Tengah.

Dalam sejarah, pekerja pelintas batas Negara bidang infrastruktur ini termasuk gejala yang sulit terdeteksi secara akurat. Bahkan di Negara-negara maju sekalipun seperti di Eropa misalnya.

Perlu kiranya kita lihat situasi dan perkembangan pekerja di bidang pengadaan infrastruktur ini di dalam negeri sebagaimana yang didata oleh Biro Pusat Statistik yang diadakan setiap bulan Februari dan Agustus setiap tahun, khusus untuk pekerja diatas usia 15 tahun. Disini akan terlihat merreka yang terserap pada bulan Agustus yang angka penyerapannya lebih besar dibanding bulan Februari. Bisa dipahami terutama karena untuk proyek Pemerintah dalam bulan Februari itu baru dalam tahap mobilisasi atau bahkan baru persiapan tender. Gambaran ini sekaligus juga perlu untuk distribusi kebijakan dalam pembinaan agar hasilnya lebih mendekati sasaran.

Berikut ini kita coba melihat berbagai aspek penting penyerapan tenaga kerja bidang bangunan itu dalam lima tahu terakhir sampai dengan tahun lalu. (2015)

Tabel 1
CONSTRUCTION WORKERS INDONESIA
August

Years	Male	Female	TOTAL	Urban	Rural
2011	6.148.352	191.459	6.339.811	3.556.271	2.783.540
2012	6.636.969	154.693	6.791.662	3.673.068	3.118.594
2013	6.089.600	187.123	6.276.723	3.600.163	2.676.560
2014	7.077.583	202.503	7.280.086	4.059.070	3.221.016
2015	8.010.671	197.415	8.208.086	4.708.016	3.500.070
	96,52 %	3,48 %	100 %	56,15 %	43,85 %

Source : Central Bureau of Statistic

Pertama-tama disini terlihat bahwa rata-rata dari tahun 2011 sampai 2015 kaum wanita yang terserap masih belum maksimal, berkisar di angka 3,48%. Pekerjaan di bidang pengadaan infratraktur itu memang merupakan pekerjaan kaum lelaki. Kemudian mereka yang bekerja itu sedikit lebih banyak di perkotaan dibanding pedesaan, yaitu 56,15% dibanding 43,85%. Dalam daftar diatas juga terlihat penurunan jumlah pekerja yang terserap di tahun 2013 dibanding tahun 2012, menurun sekitar 500 ribu orang. Tetapi tahun 2013 dan tahun 2014 angka yang terserap itu meningkat drastis masing-masing sekitar satu juta orang. Ini tentu akibat pengaruh kebijaksanaan Pemerintah yang meningkat untuk pengadaan infrastruktur.

Latar Belakang Pendidikan

Lebih lanjut dalam Tabel 2, terlihat

rincian latar belakang pendidikan mereka yang terserap. Dalam hal ini dapat dibagi dalam tiga kategori yaitu dari yang tanpa Pendidikan Dasar sama sekali, Tidak Tamat SD, dan Tamat SD yang termasuk kategori Pendidikan Rendah. Kemudian kategori pendidikan menengah terdiri atas latar belakang pendidikan SMP dan SMA/K, dan kategori berpendidikan Tinggi yang terdiri dari pemegang Diploma I II dan III, Akademi dan yang tamat Perguruan Tinggi.

Disini terlihat bahwa rata-rata lebih dari 50% adalah mereka yang berpendidikan rendah. Bahkan mereka yang tak berpendidikan sama sekali juga cukup banyak. Hanya di tahun 2015 angka itu menurun jadi 48,61 %. Sedangkan yang berpendidikan menengah adalah sekitar 45%. Dalam rincian diatas itu juga terlihat bahwa mereka yang berpendidikan menengah kejuruan lebih kecil jumlahnya dari mereka yang berpendidikan menengah

Tabel 2

CONSTRUCTION WORKERS EDUCATIONAL ATTAINMENT

August	2011	2012	2013	2014	2015
1. No. Schooling	102.066	95.014	104.808	110.339	88.314
2. Not Yet Completed Primary School	853.505	865.721	780.780	889.565	945.152
3. Primary School	2.337.716	2.540.715	2.269.448	2.708.888	2.957.162
4. Junior High School	1.557.475	1.665.910	1.523.111	1.727.756	2.068.996
5. Senior High School :					
General	750.403	791.402	772.455	915.026	1.082.211
Vocational	514.431	573.724	549.974	610.366	704.186
6. Diplomas (I- II-III)					
Academy	60.588	61.799	70.300	68.261	75.932
7. University	163.627	197.377	205.847	249.885	286.133
Total	6.339.8116	791.6626	276.7237	280.9868	208.086

SUMMARY	2011	2012	2013	2014	2015
Lower Education					
A No. 1 - 3	3.293.287	3.501.450	3.155.036	3.708.792	3.990.628
	51,95%	51,55%	50,26%	50,94%	48,61%
Middle Education					
B. No. 4 - 5	2.822.309	3.031.036	2.845.540	3.253.148	3.855.393
	44,52%	44,63%	45,34%	44,68%	46,97%
Higher Education					
C. No. 6 - 7	224.215	259.176	276.147	318.146	362.065
	3,52%	3,82%	4,40%	4,37%	4,42%

Source : Central Bureau of Startistic

umum atau yang bukan kejuruan. Padahal tentu kita berharap mereka yang berpendidikan menengah kejuruan ini yang akan lebih banyak terserap demi meningkatkan produktivitas.

Untuk mereka yang tergolong berpendidikan tinggi ternyata hanya mewakili antara 3,52% sampai paling tinggi 4,42% saja. .

Proffesi

Gambaran pada tabel 3 memperlihatkan jabatan atau profesi dari kaum pekerja yang terserap itu selama tahun 2014 dan 2015.

Diatas terlihat bahwa 91,30% (2014) dan 92,35% (2015) adalah mereka yang berprofesi sebagai tenaga produksi dan yang sejenis, pengemudi, operator dan pekerja kasar lainnya. Dengan demikian hanya sekitar 8% atau 7% saja yang tenaga Profesional, Manajerial, Teknisi dan Administrativ

Hal ini juga berarti proses pengadaan infrastruktur ini cukup potensial untuk menyerap tenaga yang berlatar belakang pendidikan rendah itu. Artinya sangat

berjasa menciptakan lapangan kerja bagi angkatan kerja kita yang memang bagian terbesar berpendidikan menengah ke bawah.

Sementara itu dewasa ini sudah terdapat fenomena bahwa pasaran domestik pekerjaan di bidang jasa konstruksi ini sudah mulai dimasuki pekerja asing. Hal yang mungkin tidak terbayangkan sebelumnya mengingat sebelumnya banyaknya pekerja kasar kita yang mencari kerja di luar negeri.

Tabel 3

CONSTRUCTION WORKERS INDONESIA MAIN OCCUPATION

August	2014	%	2015	%
1. Professionals, Technical and Related Workers	150.663	2,07	164.752	2,01
2. Administrative and Managerial Workers	172.072	2,37	144.900	1,77
3. Clerical and Related Workers	157.743	2,16	154.532	1,88
4. Sales Workers	38.999	0,54	33.932	0,41
5. Services Workers	113.269	1,56	129.699	1,58
6. Agriculture, Animal Husbandry, Forestry, Fisherman and Hunters	-	-	-	-
7. Production and Related Workers, Transport Equipment, Operators and Laborers.	6.647.340	91,30	7.580.271	92,35
TOTAL	7.280.086	100	-8.208.086	100

Source : Central Bureau of Statistic

Sebuah artikel yang ditulis mantan Menko Ekuin Ginanjar Kartasasmita di harian Kompas 12 Mei 2016 mengulas cukup rinci hal tsb. Tercatat sebanyak 12.800 orang kini yang sudah bekerja di sini. Bahkan dikuatirkan bahwa fenomena ini hanyalah seolah ibarat gunung es, jauh lebih banyak lagi yang tidak tercatat resmi. Banyak Negara menghadapi masalah pekerja gelap di bidang jasa konstruksi ini memang sulit diatasi. Panjangnya pantai, luasnya daerah dan banyaknya pintu untuk memsuki kepulauan Indonesia akan sangat sulit untuk melakukan pengawasan.

Pemerintah akan terus meningkatkan investasi di bidang infrastruktur baik dari dana-dana Pemerintah, BUMN swasta maupun campuran. Sementara lapangan kerja yang tersedia itu masih sangat dibutuhkan oleh pencari kerja kita. *

**Achwar Zen**

Pensiunan Biro Bina Sarana Perusahaan – Sekretaris Jenderal Departemen Pekerjaan Umum Kasubag. Tenaga Kerja Konstruksi 1984 – 1994, Kabag. TU BUMN Konsultansi 1994 – 1996

Model Pembiayaan dan Investasi KPBU Perumahan Rakyat

✍️ Decki R. Firdiansyah, M.Sc., M.Ec.Dev.

Salah satu perubahan mendasar dari Perpres Nomor 38 Tahun 2015 adalah adanya penambahan jenis-jenis infrastruktur yang dapat dikerjasamakan melalui skema Kerjasama Pemerintah-Badan Usaha (KPBU). Dalam aturan baru tersebut, jenis-jenis yang dapat dikerjasamakan juga meliputi infrastruktur sosial seperti infrastruktur fasilitas perkotaan, fasilitas pendidikan, fasilitas sarana dan prasarana olahraga, serta kesenian, kesehatan, lembaga pemasyarakatan, dan perumahan rakyat. Dengan masuknya infrastruktur sosial ke dalam jenis infrastruktur yang dapat diselenggarakan melalui skema KPBU diharapkan infrastruktur sosial yang disediakan dapat semakin banyak sehingga tanggung jawab pemerintah dalam melayani masyarakat dapat berlangsung lebih baik.

Target utama penyediaan infrastruktur perumahan rakyat adalah penurunan backlog (defisit) perumahan (berdasarkan konsep kepemilikan). Berdasarkan data Bappenas dan BPS, pada tahun 2014 backlog perumahan mencapai 13,5 juta unit rumah. Kondisi eksisting pada tahun 2015, terjadi penurunan jumlah backlog menjadi 11,4 juta unit. Target backlog perumahan yang hendak dicapai pada tahun 2019 adalah sebesar 6,8 juta unit.

Backlog penyediaan perumahan khususnya untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) tidak luput dari sejumlah permasalahan-permasalahan yang menghinggapinya. Menurut data dari Ditjen Penyediaan Perumahan, permasalahan-permasalahan tersebut antara lain adalah :

- Ketimpangan antara pasokan (supply) dan kebutuhan (demand);
- Keterbatasan kapasitas pengembang (developer) yang belum didukung oleh regulasi yang bersifat insentif;
- Rendahnya keterjangkauan (affordability) MBR, baik membangun atau membeli rumah sehingga menyebabkan banyak MBR belum tinggal di rumah layak huni;
- Pembangunan perumahan, khususnya di area perkotaan (urban area) terkendala dengan proses pengadaan lahan;

e. Peran pemerintah pusat dan daerah sebagai enabler masih lemah.

Salah satu upaya penanganan permasalahan-permasalahan di atas adalah pembangunan Rusunawa (Rumah Susun Sewa). Target penerima bantuan Rusunawa (Rumah Susun Sewa) diprioritaskan kepada MBR (baik pekerja atau buruh), penghuni kawasan kumuh, dan TNI/POLRI. Pembangunan Rusunawa tersebut menjadi strategis mengingat dapat sedikit mengatasi masalah keterbatasan lahan di kota-kota besar.

Skema pembiayaan yang umumnya digunakan dalam penyediaan perumahan rakyat adalah pembiayaan APBN. Alokasi pembiayaan penyediaan perumahan yang dianggarkan dalam RPJMN 2015-2019 adalah sebesar Rp. 33,09 Triliun. Nilai tersebut dianggarkan untuk memenuhi target fisik RPJMN yang sangat besar, yang salah satunya untuk penyediaan rumah susun. Dengan memperhitungkan ulang rasionalisasi target fisik RPJMN berdasarkan alokasi yang ada, menurut Ditjen Penyediaan Perumahan masih terdapat gap pendanaan sebesar Rp. 151,56 Triliun mengingat total anggaran yang dibutuhkan untuk memenuhi seluruh target fisik RPJMN 2015-2019 diperkirakan mencapai Rp. 184,66 Triliun.

Dengan terbitnya Perpres Nomor 38 Tahun 2015 tersebut, terbuka kesempatan untuk melakukan penyediaan infrastruktur sosial melalui skema KPBU termasuk di antaranya fasilitas perumahan rakyat. Hal tersebut akan memberikan ruang kepada pemerintah dalam hal kewajiban penyediaan infrastruktur untuk rakyatnya (Public Sector Obligation) sehingga semua rakyat akan dapat menikmati infrastruktur yang layak. Manfaat lainnya adalah dana-dana APBN dapat dialokasikan kepada pembangunan infrastruktur lainnya yang sangat mendesak.

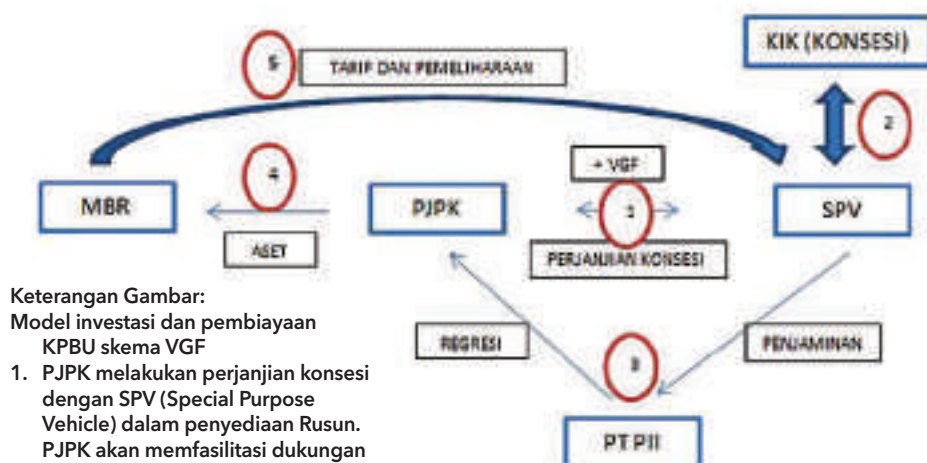
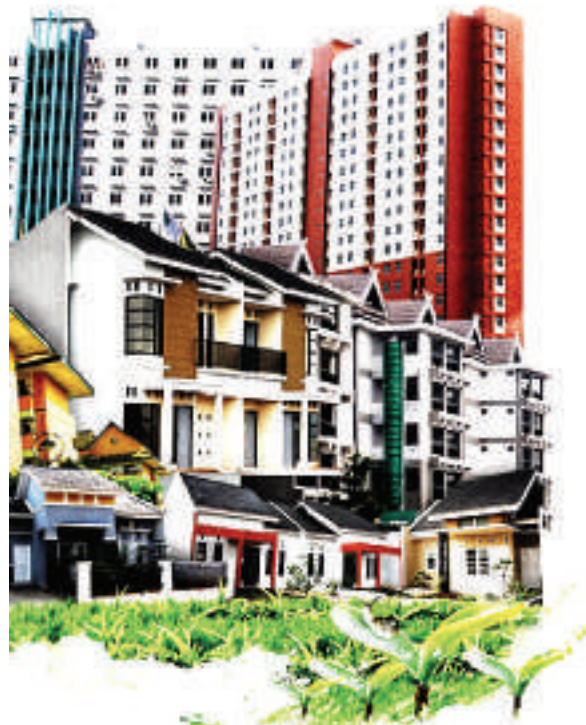
Skema KPBU seyogyanya dapat dijadikan alternatif lain dalam penyediaan perumahan khususnya Rusunawa MBR. Namun demikian, skema KPBU yang ditawarkan harus benar-benar menarik bagi dunia usaha sebab skema KPBU untuk perumahan merupakan hal baru bagi dunia usaha. Sejauh ini

belum ada contoh proyek kerja sama yang sudah diluncurkan mengingat mayoritas kalangan pengembang sedikit enggan menjalankan usaha yang terkait langsung dengan pemerintahan karena pengembalian investasinya yang kecil. Selama ini kerja sama dengan pemerintah bersifat tidak langsung melalui pemanfaatan dana subsidi berupa Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) yang disiapkan pemerintah untuk pembangunan rumah murah.

Untuk mengatasi hal tersebut, diperlukan suatu skema pembiayaan dan investasi yang menarik swasta agar penyediaan perumahan Rusunawa MBR melalui skema KPBU dapat dilaksanakan. Salah satu alternatifnya adalah melalui skema KPBU adalah Availability Payment (pembayaran atas ketersediaan layanan), yaitu pembayaran secara berkala oleh Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah kepada Badan Usaha Pelaksana atas tersedianya layanan infrastruktur yang telah dibangun dengan dana badan usaha tersebut, sesuai dengan kualitas dan/atau kriteria sebagaimana ditentukan dalam perjanjian KPBU. Availability Payment (AP) dianggarkan secara berkala pada setiap tahun anggaran sesuai peraturan perundang-undangan.

Dalam model investasi skema KPBU Availability Payment untuk penyediaan perumahan, pengguna layanan (penghuni rusun) dikenakan tarif untuk operasi dan pemeliharaan aset rusunawa dengan memperhatikan kemampuan/kemauan membayar (Ability to Pay (ATP)/Willingness





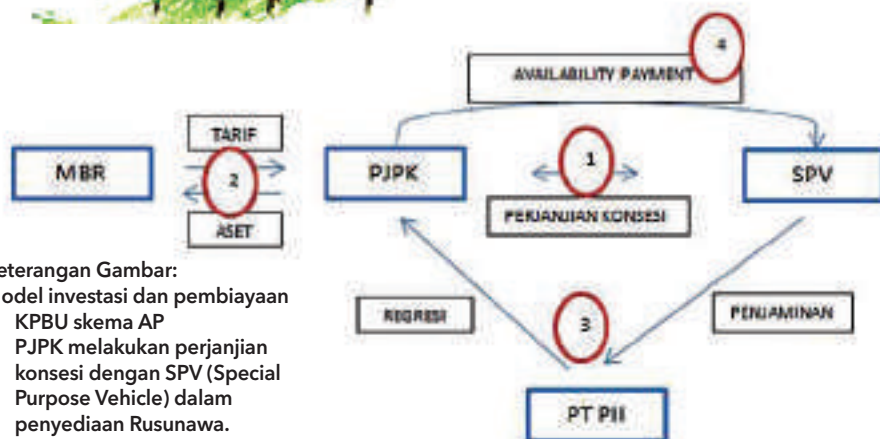
Keterangan Gambar:

Model investasi dan pembiayaan KPBUskema VGF

1. PJKP melakukan perjanjian konsesi dengan SPV (Special Purpose Vehicle) dalam penyediaan Rusun. PJKP akan memfasilitasi dukungan VGF dalam proyek tersebut.
2. SPV mendapatkan dana investasi dari masyarakat melalui Kontrak Investasi kolektif (KIK).
3. PT PII melakukan perjanjian penjaminan dengan SPV dan perjanjian regresi dengan PJKP.
4. PJKP memberikan aset berupa perumahan kepada MBR.
5. Penghuni Rusun (MBR) membayar tarif kepada SPV, yang selanjutnya SPV akan memberikan hasil investasi kepada para investor KIK.

Gambar 2. Model investasi dan pembiayaan KPBUskema VGF

dengan skema KPBUskema dukungan pemerintah tersebut dapat dikombinasikan dengan skema KIK (Kontrak Investasi Kolektif) agar dapat menampung dana masyarakat lebih banyak lagi. Skema KIK tersebut akan mengungkit (leverage) pembiayaan yang dilakukan pemerintah melalui VGF. Ada pun yang menjadi jaminan dalam investasi KIK tersebut adalah hak konsesi yang diberikan kepada SPV. Dalam skema KPBUskema dukungan pemerintah ini, SPV setelah mendapatkan hak konsesi akan mengelola dan memelihara aset rusunawa. Tarif kepada pengguna layanan akan dikelola oleh SPV untuk pengoperasian dan pemeliharaan aset (rusunawa). Untuk menjamin keberlangsungan penyelenggaraan infrastruktur, jaminan pemerintah melalui PT. Penjaminan Infrastruktur Indonesia (PT. PII) dapat diberikan baik dengan skema KPBUskema AP maupun skema KPBUskema dukungan pemerintah*



Keterangan Gambar:

Model investasi dan pembiayaan KPBUskema AP

1. PJKP melakukan perjanjian konsesi dengan SPV (Special Purpose Vehicle) dalam penyediaan Rusunawa.
2. PJKP memberikan aset berupa Rusun kepada MBR, dan MBR membayarkan tarif kepada PJKP.
3. PT. PII melakukan perjanjian penjaminan dengan SPV dan perjanjian regresi dengan PJKP.
4. PJKP membayar pengembalian investasi kepada investor/ SPV dengan dana Availability Payment.

Gambar 1. Model investasi dan pembiayaan KPBUskema AP

to Pay (WTP)) dari pengguna layanan. Mengingat badan usaha pelaksana KPBUskema (Special Purpose Vehicle/ SPV) sudah mendapatkan balikan investasi melalui pembayaran terjadwal Availability Payment, maka tarif layanan akan dibayarkan oleh pengguna layanan kepada PJKP atau unit pelaksana teknis yang ditunjuk oleh PJKP.

Skema KPBUskema penyediaan perumahan dapat juga menggunakan skema KPBUskema dukungan pemerintah melalui Viability Gap Fund (VGF). Model investasi





105 PEKERJA KONSTRUKSI di Tasikmalaya IKUTI UJI SERTIFIKASI

 **Indri Eka Lestari**

Melewati Gunung Melewati Lembah, Sungai Mengalir Indah Ke Samudra...! Penggalan lagu anak-anak ninja hatori ini mungkin menggambarkan tentang kami (tim redaksi) melakukan perjalanan ke Kota Tasikmalaya, Jawa Barat. Menempuh jarak selama enam jam perjalanan tidak membuat kami lelah, karena di suguhkan pemandangan nan indah dari bukit-bukit hingga pegunungan yang elok.

Perjalanan tim ke kota yang memiliki julukan, Sang Mutiara dari Priangan Timur ini, bukanlah untuk menikmati sejuknya kota yang dikelilingi oleh pegunungan. Melainkan melakukan peliputan langsung uji sertifikasi tenaga kerja konstruksi disalah satu pusat kota Tasikmalaya.

Menginjakkan kaki di Tasikmalaya, tim langsung menuju lokasi Uji Sertifikasi tenaga kerja konstruksi. Kesempatan ini kami gunakan untuk mengamati langsung proses uji sertifikasi yang dilakukan

atas kerjasama dari Kementerian PUPR, Direktorat Jenderal Bina Konstruksi melalui Balai Jasa Konstruksi Wilayah III Jakarta, dengan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) Prov. Jawa Barat, Politeknik Negeri Bandung, dan PT. Indocement Tbk.

Sebanyak 105 pekerja konstruksi yang terdiri dari mandor dan tukang di wilayah Tasikmalaya Jawa Barat mengikuti uji sertifikasi. Uji sertifikasi yang dilaksanakan selama tiga hari sejak Senin s.d. Rabu (19-21/09) ini merupakan salah satu upaya Kementerian PUPR dalam menghadapi persaingan global, khususnya di sektor konstruksi dengan



mempersiapkan tenaga kerja konstruksi yang berkompeten, handal, dan bersertifikat.

Menurut Kepala Balai Jasa Konstruksi Wilayah III Jakarta, yang diwakili oleh Kepala Seksi Penyelenggaraan Pelatihan Chandra Permana, Kegiatan ini adalah upaya nyata Pemerintah dan stakeholders konstruksi untuk meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) konstruksi.

Melihat langsung, 105 mandor dan tukang ini dibagi menjadi tiga kelas yang terdiri dari 32 orang dalam satu kelas ini mendapatkan pembekalan secara lisan oleh instruktur dari Politeknik Negeri Bandung (PolBAN). Tidak hanya duduk dikelas selama berjam-jam, peserta yang mayoritas berprofesi sebagai pekerja konstruksi di wilayah Tasikmalaya dan Jawa Barat ini, dihari terakhir mendapatkan uji kompetensi dari LPJK Prov. Jawa Barat dengan melakukan wawancara kepada para peserta.

Saat instruktur hendak menjelaskan tentang komposisi mortar di dalam kelas, "Eta teh naon pak" (itu apa pak) teriak salah satu peserta kelas C Wawan Suryana (38), dengan bahasa sunda di dalam kelas. Instruktur pun, langsung menjelaskan bahwa komposisi mortar adalah adukan semen pasir. Dengan serempak, seluruh peserta menganggukkan kepala dan melanjutkan materi.

Instruktur mengatakan kepada tim, disela-sela jam istirahat bahwa para peserta pada umumnya mengerti dan memahami penyampaian materi. Hanya saja, terdapat beberapa perbedaan istilah dilapangan dengan bahasa akademisi. Namun, hal tersebut menjadi hal yang tidak mengganggu penyampaian materi di dalam kelas.

Perbedaan tersebut terbilang wajar, karena mayoritas pendidikan para pekerja konstruksi tersebut merupakan lulusan SD, dan SMP. Maklum saja, para peserta mayoritas berusia 25- 68 tahun ini merupakan pekerja lapangan yang tidak mengenyam pendidikan bidang teknik secara langsung.



Tantangan pembangunan infrastruktur ke depan adalah bagaimana untuk terus meningkatkan ketersediaan infrastruktur berkualitas dan kinerjanya semakin dapat diandalkan agar daya tarik dan daya saing Indonesia dalam konteks global semakin membaik.



Kesempatan mendapatkan akses informasi dan teknologi serta mengikuti pelatihan atau program capacity building, diharapkan dapat dimanfaatkan tenaga kerja konstruksi atau Sumber Daya Manusia (SDM) konstruksi untuk meningkatkan kompeten dan lebih kompetitif.

Setelah menutup hari pertama dengan penjelasan tentang komposisi mortar, dan dilanjutkan dengan praktek lapangan, para peserta beristirahat sambil mempersiapkan kelas di hari kedua. Tidak kalah antusias dengan hari kemarin, para peserta mengawali hari dengan melakukan games untuk melatih kekompakan dan kerjasama tim sebelum

memasuki kelas.

Di hari kedua, peserta mendapatkan pelatihan tentang bagaimana merencanakan anggaran bangunan (RAB) di proyek pekerjaan konstruksi. Peserta diajarkan bagaimana cara menggunakan material bangunan yang hemat sehingga meringankan anggaran biaya. Setelah menjelaskan, instruktur melakukan pengujian dengan memberikan studi kasus kepada peserta, dan membagi peserta menjadi 3 kelompok dengan masing-masing kelompok beranggota 10 orang.

Di kelas hari kedua ini, terlihat kelas lebih





antusias terutama para tukang yang masih berusia muda. Menurut Priyatna (64) tahun mengaku sedikit tidak memahami tentang penjelasan di hari kedua, pasalnya dirinya hanya mengenyam pendidikan SD. Namun, dirinya memiliki pengalaman menjadi pekerja konstruksi selama 35 tahun. Dan sudah melakukan pekerjaan di berbagai tempat di wilayah Jawa Barat, hingga ke Jakarta dan Surabaya.

Berbeda dengan Priyatna, Asep Maulana (29), pelatihan uji sertifikasi ini sangat menarik karena dirinya dapat menambah pengetahuan tentang dunia konstruksi. Meski pengalamannya belum sebanyak peserta lainnya, dan hanya berprofesi sebagai tukang dengan penghasilan 70 – 90 ribu per minggu ini berharap jika nanti dirinya dapat naik kelas menjadi mandor dan menaikkan pendapatannya setelah mendapat sertifikat.

Tantangan pembangunan infrastruktur ke depan adalah bagaimana untuk terus meningkatkan ketersediaan infrastruktur berkualitas dan kinerjanya semakin dapat diandalkan agar daya tarik dan daya saing Indonesia dalam konteks global semakin membaik. Salah satu usaha yang dirasa perlu dilakukan untuk menjawab tuntutan tersebut adalah dengan cara meningkatkan kualitas pekerjaan konstruksi.

Sertifikasi menjadi hal yang sangat penting. Karena di hari-hari mendatang, tantangan pembangunan infrastruktur terus meningkat, dimana diperlukan ketersediaan infrastruktur berkualitas dan kinerjanya harus dapat diandalkan dan dibuktikan. Bukti ini tidak lain adalah sertifikat.

Sehingga daya tarik dan daya saing Indonesia dalam konteks global harus semakin membaik. "Salah satu usaha yang dirasa perlu dilakukan untuk

menjawab tuntutan tersebut adalah dengan cara meningkatkan kualitas pekerjaan konstruksi," ungkap Chandra, saat berbincang dengan tim.

Sektor konstruksi adalah salah satu sektor andalan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, dan selalu dituntut untuk tetap meningkatkan kontribusinya melalui tolak ukur terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional. Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa sejarah kontribusi sektor konstruksi terhadap PDB terus meningkat, dari hanya sebesar 3,9% di tahun 1973 hingga mencapai lebih dari 10% di awal tahun 2013.

Meskipun sering mengalami pasang surut seiring dengan kondisi perekonomian nasional, namun perkembangan sektor konstruksi di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir ini sangat menggembirakan. Anggaran Infrastruktur Indonesia dari tahun ke tahun semakin meningkat, hal ini bisa dilihat pada anggaran infrastruktur tahun 2015 yang mencapai Rp.290 Triliun naik dari tahun 2010 yang hanya sebesar Rp. 99 Triliun.

Setiap tahun World Economic Forum mengeluarkan "The Global Competitiveness Report" dimana di dalamnya memperlihatkan indeks daya saing dari negara-negara di dunia. Peringkat daya saing Indonesia meningkat 13 poin, dari peringkat 50 pada tahun 2012 menjadi peringkat 37 pada tahun 2015 lalu. Indeks daya saing tersebut diukur terhadap 12 pilar dimana salah satunya sangat berkaitan dengan tugas Direktorat Jenderal Bina Konstruksi (DJBK) dalam pembinaan jasa konstruksi. Saat ini, Indonesia menempati peringkat 62 dari 144 negara pada tahun 2015, naik 16 peringkat jika dibandingkan pada tahun 2012, yang menempatkan Indonesia pada peringkat 78.



Saat ini DJBK terus mendorong penyelenggaraan pelatihan dengan berbagai macam variasi model yang difokuskan kepada jabatan kerja kunci yaitu project manager, pengawas, mandor dan tukang. Sedangkan model pelatihannya antara lain dengan menggunakan model distance learning seperti pelatihan dengan menggunakan Mobile Training Unit (MTU), seminar dan kursus singkat, serta uji sertifikasi yang dilanjutkan dengan memberikan sertifikat terus ditingkatkan DJBK guna mencapai target 750.000 tenaga kerja konstruksi bersertifikat di tahun 2019. *



DIREKTORAT JENDERAL BINA KONSTRUKSI
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM & PERUMAHAN RAKYAT



PROGRAM STRATEGIS TAHUN 2015-2019

TERKAIT TENAGA KERJA KONSTRUKSI INDONESIA BERSERTIFIKAT

MENGHASILKAN **10.000** ORANG
INSTRUKTUR/ASESOR PELATIHAN KONSTRUKSI.

MENGHASILKAN **50.000** ORANG
INSINYUR BARU UNTUK BIDANG KONSTRUKSI YANG BERSERTIFIKAT.

MENGHASILKAN **200.000** ORANG
TEKNISI BERSERTIFIKAT.

MENGHASILKAN **500.000** ORANG
TENAGA TERAMPIL BERSERTIFIKAT.



**"TENAGA KERJA KONSTRUKSI INDONESIA,
TERAMPIL DAN HANDAL, PASTI!"**

DIREKTORAT JENDERAL BINA KONSTRUKSI KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

Gedung Utama Lt. 10 Jl. Pattimura No. 20 Kebayoran Baru Jakarta Selatan 12110

Tlp/Fax. 021-7266640 / 021-72797848 | www.binakonstruksi.pu.go.id | email : hukumdatakompu.djbk@gmail.com



DIREKTORAT JENDERAL BINA KONSTRUKSI

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

PROGRAM STRATEGIS TAHUN 2015-2019

200 Kerjasama strategis

Dengan K/L, Pemda, PT, LPJK, Asosiasi, BUJK, Proyek, Masyarakat

10.000 Orang

Jumlah instruktur/asesor pelatihan konstruksi

50.000 Orang

Jumlah insinyur baru konstruksi bersertifikat

200.000 Orang

Jumlah teknisi bersertifikat

500.000 Orang

Jumlah tenaga terampil bersertifikat

30%

Penggunaan beton pracetak

40%

Pekerjaan konstruksi yang menerapkan manajemen mutu dan tertib penyelenggaraan konstruksi

125 BUJK

Peningkatan BUJK ke Kualifikasi Besar

Rp 15 Triliun

Ekspor jasa konstruksi ke luar negeri

DIREKTORAT JENDERAL BINA KONSTRUKSI
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Gedung Utama Lt. 10 Jl. Pattimura No. 20 Kebayoran Baru Jakarta Selatan 12110
Tlp/Fax, 021-7266640 / 021-72797848

